



LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR 1 TAHUN 2014

PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 1 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2008 TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2005 – 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai hasil musrembang Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat merekomendasikan perlu melakukan perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
 - b. bahwa Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2005–2025, perlu dilakukan penataan dan penyesuaian kembali;
 - b. bahwa penyesuaian dan penataan dimaksudkan untuk menjamin agar kegiatan pembangunan berjalan lebih efektif, efisien, dan tepat sasaran sesuai dengan kondisi dan harapan yang ingin dicapai dan diselaraskan dengan sistem pembangunan nasional maupun kondisi faktual daerah, guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat Nusa Tenggara Barat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2005 – 2025;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
dan
GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2008 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2005- 2025.

Pasal I

Lampiran Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2008 Nomor 3) diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 4 Maret 2014

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

ttd.

H. M. ZAINUL MAJDI

Diundangkan di Mataram
pada tanggal 5 Maret 2014

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NTB,

ttd.

H. MUHAMMAD NUR

LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2014 NOMOR 1

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NTB

Kepala Biro Hukum,

H. R U S M A N
NIP. 19620820 198503 1 010

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR 1 TAHUN 2014
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2008
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2005–2025

I. UMUM

Berdasarkan Pasal 150 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah disusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan Pembangunan Daerah disusun secara berjangka. Perubahan atas Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah disingkat RPJP Daerah untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun yang memuat visi, misi, dan arah pembangunan daerah yang mengacu pada RPJP Nasional. Dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, juga disebutkan bahwa perubahan RPJP Daerah memuat visi, misi, dan arah pembangunan Daerah yang mengacu pada RPJP Nasional. Dengan demikian, dokumen perubahan RPJP Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2005 - 2025 ini lebih bersifat visioner dan hanya memuat hal-hal mendasar sehingga memberi keleluasaan yang cukup bagi penyusunan rencana pembangunan jangka menengah 5 (lima) tahunan dan rencana kerja pembangunan daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Perubahan Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2005 - 2025 merupakan kelanjutan dan pembangunan dari tahap pembangunan yang sudah dilakukan sebelumnya. Dalam perubahan RPJP Daerah ini, dilakukan penataan kembali berbagai langkah-langkah, baik di bidang pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya budaya dan kelembagaannya sehingga masyarakat dan Daerah Nusa Tenggara Barat dapat mengejar ketertinggalan dan mempunyai posisi yang sejajar dengan daerah-daerah lainnya di Indonesia serta memiliki daya saing yang kuat.

Tujuan yang ingin dicapai dengan ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Perubahan RPJP Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2005 - 2025 adalah untuk: (a) mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan dan unsur governance dalam pencapaian tujuan pembangunan daerah; (b) menjamin tercapainya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar ruang, antar daerah kabupaten dan kota, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara pusat dan daerah, (c) menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan; (d) menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, adil, akuntabel, dan berkelanjutan; dan (e) mengoptimalkan partisipasi masyarakat.

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah diwujudkan dalam visi, misi, dan arah pembangunan daerah yang mencerminkan cita-cita bersama yang akan dicapai oleh masyarakat Nusa Tenggara Barat. Visi pembangunan masyarakat Nusa Tenggara Barat untuk 20 (dua puluh) tahun mendatang, yaitu terwujudnya masyarakat yang beriman, maju, dan sejahtera. Berazaskan visi tersebut, dirumuskan misi, yang merupakan upaya-upaya ideal untuk mencapai visi tersebut. Selanjutnya, misi dijabarkan ke dalam arah kebijakan dan strategi pembangunan jangka panjang daerah.

Karena lampiran Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, maka batang tubuh dari Peraturan Daerah tentang Perubahan RPJP Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2005 - 2025 cukup terdiri dari 8 (delapan) pasal yang mengatur mengenai pengertian-pengertian, muatan perubahan RPJP Daerah Provinsi, hubungan konsultasi dalam penyusunan perubahan RPJP Daerah Provinsi, pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJP Daerah Provinsi dan RPJP Daerah Kabupaten dan Kota, dan ruang untuk melakukan perubahan terhadap RPJM Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota dalam wilayah Nusa Tenggara Barat dengan berlakunya RPJP Daerah Provinsi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas

Pasal II

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 98

LAMPIRAN

PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2008

TENTANG

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2005 – 2025**

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN	1
	1.1 Latar Belakang	1
	1.2 Maksud dan Tujuan	3
	1.3 Landasan Hukum	3
	1.4 Hubungan RPJP Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya.....	4
	1.5 Sistematika Penulisan	5
BAB II	KONDISI UMUM DAERAH	
	2.1 Kondisi Saat Ini	6
	2.2 Modal Dasar Pembangunan	13
	2.3 Tantangan Ke depan	15
BAB III	VISI DAN MISI PEMBANGUNAN DAERAH	20
	3.1 Visi.....	20
	3.2 Misi	21
BAB IV	ARAH DAN TAHAPAN PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG 2005-2025	22
	4.1 Arah Pembangunan	24
	4.2 Tahapan dan Skala	38
	Prioritas	
	4.2.1 RPJM Daerah ke – 1 (2005 – 2008)	38
	4.2.2 RPJM Daerah ke – 2 (2009 – 2013)	40
	4.2.3 RPJM Daerah ke – 3 (2014 – 2018)	43
	4.2.4 RPJM Daerah ke – 4 (2019 – 2023)	44
	4.2.5 RPJM Daerah ke – 5 (2024 – 2025)	46
BAB V	PENUTUP	47
	 LAMPIRAN	

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Provinsi Nusa Tenggara Barat dibentuk pada tanggal 14 Agustus 1958 berdasarkan Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1649). Pada awal pembentukannya, penyelenggaraan pemerintahan mengacu pada dua Undang-Undang (UU) yang berbeda yaitu Undang-Undang (UU) Negara Indonesia Timur (NIT) Nomor 44 Tahun 1950 dan UU Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah. Keadaan ini tidak berlangsung lama karena pada tanggal 17 Desember 1958 penyelenggaraan pemerintahan di Nusa Tenggara Barat harus mengacu kepada UU Nomor 1 tahun 1957 yang menandai terbentuknya Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat secara nyata. Tanggal 17 Desember kemudian dijadikan sebagai hari lahir Provinsi Nusa Tenggara Barat. Hingga saat ini Provinsi Nusa Tenggara Barat telah sudah mengisi pembangunannya selama 48 tahun tahun.

Dalam era sepuluh tahun pertama (1958-1968), masyarakat Nusa Tenggara Barat menghadapi kesulitan dalam segala bidang, terutama di bidang ekonomi. Hal ini merupakan rentetan dari persoalan-persoalan yang diwariskan NIT, ditambah dengan kurang cepatnya Pemerintah Pusat dalam menyelesaikan permasalahan konsolidasi pemerintahan. Dampaknya, pada akhir tahun 1961 masyarakat mengalami kesulitan ekonomi akibat dari kenaikan harga kebutuhan pokok terutama beras yang sangat tinggi. Kesulitan tersebut memuncak menjelang peristiwa G-30-S/PKI tahun 1965, dan terus berlangsung hingga tahun 1968. Akibatnya, penduduk yang berada terutama di wilayah Lombok Bagian Selatan mengalami penderitaan yang luar biasa sehingga sebagian dari mereka menemui ajalnya.

Selanjutnya pada kurun waktu 1969-1984, masyarakat dan pemerintah daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan dukungan penuh Pemerintah Pusat, berhasil menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis melalui tahapan Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita) Daerah yang mengacu pada Repelita Nasional. Tahapan-tahapan pembangunan yang disusun dalam masa itu telah berhasil meletakkan dasar-dasar bagi suatu proses pembangunan di daerah, terutama dalam bidang pertanian. Hasilnya, pemerintah dan masyarakat dapat mengatasi rawan pangan dengan mewujudkan swasembada beras pada tahun 1984.

Kemudian pada kurun waktu 1985-1997, pembangunan di daerah yang sangat berorientasi pada hasil, dan kurang memperhatikan proses dan keberagaman daerah, menjadikan daerah-daerah tidak dapat mengembangkan potensinya secara nyata. Model perencanaan pembangunan daerah yang sangat sentralistis melalui UU Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah, menjadi salah satu sebab timpangnya hasil pembangunan dan terciptanya disparitas antar wilayah dan sektor. Dampaknya, daerah Nusa Tenggara Barat yang memiliki tingkat keberagaman sosial, ekonomi dan budaya yang relatif tinggi, belum dapat mengejar ketertinggalannya dari daerah-daerah lain di Indonesia. Hal ini tercermin dari rendahnya kualitas penduduk yang diukur berdasarkan indikator ekonomi, kesehatan, dan pendidikan dalam sebuah indeks yang disebut Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Berdasarkan indeks tersebut, Provinsi Nusa

Tenggara Barat berada di urutan kedua terkebelakang dari 33 provinsi yang ada di Indonesia.

Kritis moneter dan krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 1997 yang kemudian berkembang menjadi krisis multidimensi menjadi momentum bagi reformasi seluruh sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Reformasi tersebut memberikan semangat dan cara pandang baru dalam melihat persoalan pembangunan yang dihadapi bangsa dan merumuskan model yang tepat untuk melaksanakan pembangunan. Pelaksanaan pembangunan yang didasarkan pada perencanaan pembangunan jangka panjang yang sangat sentralistis selama ini terbukti gagal menciptakan kemakmuran rakyat secara merata. Hal ini disebabkan oleh proses pembangunan yang sangat berorientasi pada *output* dan hasil akhir sehingga melupakan proses dan peningkatan kualitas institusi. Oleh karena itu, kebutuhan akan sebuah model pembangunan yang berorientasi pada proses dan penguatan kelembagaan mulai dipikirkan.

Pada kurun waktu 1998 – 2001, seluruh potensi pembangunan diarahkan pada upaya mengatasi krisis multidimensi dan memikirkan kembali model perencanaan pembangunan jangka panjang nasional dan daerah yang lebih sesuai dengan karakteristik wilayah dan dinamika masyarakat. Hasilnya, pemerintah menerbitkan UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian diganti dengan UU Nomor 32 Tahun 2004; dan UU Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang kemudian diubah menjadi UU Nomor 33 Tahun 2004. Terkait dengan perencanaan pembangunan, pemerintah mengeluarkan UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (UU SPPN) yang meliputi perencanaan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan.

Berdasarkan UU Nomor 25 Tahun 2004 dan UU Nomor 32 Tahun 2004, Pemerintahan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun. RPJP Daerah merupakan dokumen perencanaan yang memuat visi, misi, dan pembangunan daerah yang mengacu kepada RPJP Nasional. RPJP Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peranserta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, dan keadilan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

RPJP Daerah Nusa Tenggara Barat Tahun 2005-2025, adalah dokumen perencanaan daerah yang disusun dengan memperhatikan karakteristik dan potensi wilayah, dinamika dan aspirasi masyarakat. Penyusunan RPJP Daerah Nusa Tenggara Barat Tahun 2005-2025 dilakukan melalui pendekatan partisipatif, teknokratik, politik, atas-bawah (*top down*), dan bawah atas (*bottom up*). Dengan demikian, perencanaan yang disusun merupakan kesepakatan bersama dan komitmen seluruh pemangku kepentingan di daerah Nusa Tenggara Barat untuk mewujudkan kesejahteraan bersama melalui kegiatan pembangunan yang terencana, terukur, sinergis, koordinatif dan terintegrasi. Selain itu, RPJP Daerah Nusa Tenggara Barat Tahun 2005-2025 mengacu pada RPJP Nasional Tahun 2005 – 2025 dengan Visi Pembangunan yaitu “INDONESIA YANG MANDIRI, MAJU, ADIL DAN MAKMUR”.

1.2. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Nusa Tenggara Barat Tahun 2005-2025 ditetapkan dengan maksud memberikan arahan dan

sekaligus menjadi acuan bagi pemerintah daerah, masyarakat Nusa Tenggara Barat, dan dunia usaha untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan daerah sesuai dengan visi, misi, dan arah pembangunan yang disepakati bersama.

Adapun tujuan dari ditetapkannya RPJP Daerah Nusa Tenggara Barat Tahun 2005-2025 adalah menjamin terciptanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergitas antar daerah, antar pusat dan daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi, dan antar rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD). Selain itu, penetapan RPJP Daerah Nusa Tenggara Barat adalah untuk menjamin menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan serta menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

1.3. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum penyusunan RPJP Daerah Nusa Tenggara Barat Tahun 2005-2025 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan angka Panjang Nasional 2005-2025
10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
11. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
16. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah
17. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
18. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja

Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Sekretariat DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat

19. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 10 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat
20. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 11 Tahun 2000 tentang pembentukan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Provinsi Nusa Tenggara Barat
21. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 11 Tahun 2001 tentang pembentukan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perpustakaan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat
22. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 7 Tahun 2003 tentang Rencana Strategis Daerah Nusa Tenggara Barat Tahun 2003-2008
23. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2009-2029.

1.4. HUBUNGAN RPJP DAERAH DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN LAINNYA

Hubungan antara RPJP Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2005-2025 dengan dokumen perencanaan lainnya adalah sebagai berikut:

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Nusa Tenggara Barat (NTB) tahun 2005-2025 disusun sesuai dengan kewenangan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan nasional dengan mengacu kepada RPJP Nasional.
2. RPJP Daerah NTB tahun 2005-2025 menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Nusa Tenggara Barat untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
3. RPJP Daerah Nusa Tenggara Barat Tahun 2005-2025 menjadi acuan bagi daerah kabupaten/kota di Nusa Tenggara Barat dalam penyusunan RPJP daerah kabupaten/kota.
4. RPJP Daerah Nusa Tenggara Barat Tahun 2005-2025 mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2009-2029.

1.5. SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Nusa Tenggara Barat Tahun 2005-2025 disusun dalam sistematika sebagai berikut:

- Bab I : Pendahuluan
- Bab II : Kondisi Umum Daerah
- Bab III : Visi dan Misi Pembangunan Daerah
- Bab IV : Arah dan Tahapan Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005 - 2025
- Bab V : Penutup.

BAB II

KONDISI UMUM DAERAH

2.1. KONDISI SAAT INI

Pembangunan yang dilaksanakan di provinsi Nusa Tenggara Barat selama ini telah menunjukkan kemajuan di berbagai bidang kehidupan masyarakat yang meliputi bidang sosial budaya, ekonomi, sarana dan prasarana wilayah. Namun demikian, berbagai kemajuan termasuk belum sepenuhnya dapat mengatasi berbagai persoalan dan tantangan yang ada mengingat dinamika masyarakat baik tingkat lokal, regional, nasional, dan global. Oleh karena itu, dibutuhkan berbagai upaya dan strategi untuk mengatasi hal tersebut melalui kegiatan pembangunan yang terencana, terintegrasi, sinergis, dan terkoordinasi.

A. Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama

Jumlah penduduk di Nusa Tenggara Barat bervariasi antar kabupaten dan diantara dua pulau yaitu Lombok dan Sumbawa. Pulau Lombok dengan wilayah sebesar seperempat dari luas wilayah Nusa Tenggara Barat dihuni oleh 70 persen total penduduk. Sementara itu, pulau Sumbawa dengan wilayah tiga per empat dari luas wilayah Nusa Tenggara Barat, hanya dihuni oleh 30 persen total penduduk. Perbedaan luas wilayah dan jumlah penduduk juga berdampak pada tingkat kepadatan di masing-masing wilayah, dimana kepadatan penduduk di pulau Lombok jauh lebih tinggi daripada kepadatan penduduk di pulau Sumbawa.

Dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir, pertumbuhan penduduk di Nusa Tenggara Barat mengalami penurunan. Rata-rata pertumbuhan penduduk per tahun pada periode 1990-2000 sebesar 1,34 persen menurun menjadi 1,17 persen pada periode 2000-2010. Pada periode 2000-2010, pertumbuhan penduduk antar kabupaten/kota bervariasi mulai dari 0,78 persen di kabupaten Lombok Timur hingga 2,73 persen di kabupaten Sumbawa Barat. Pertumbuhan penduduk di Nusa Tenggara Barat lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan penduduk Indonesia dimana pertumbuhan penduduk di Indonesia pada periode 2000-2010 adalah sebesar 1,47 persen. Dengan pertumbuhan sebesar itu, Nusa Tenggara Barat berada di posisi kelima pertumbuhan terendah diantara provinsi di Indonesia. Kondisi ini disebabkan oleh kesuksesan program keluarga berencana dalam mengendalikan pertumbuhan di provinsi Nusa Tenggara Barat.

Pada tahun 2011, jumlah penduduk Nusa Tenggara Barat adalah 4.545.650 jiwa yang terdiri dari laki-laki sebanyak 2.207.016 jiwa dan perempuan sebanyak 2.338.634 jiwa, dengan rasio jenis kelamin sebesar 94,37. Jumlah rumah tangga keseluruhan adalah 1.261.862 rumah tangga dengan rata-rata anggota rumah tangga sebesar 3,60 orang. Kabupaten Lombok Timur merupakan kabupaten dengan jumlah penduduk terbesar, sementara kabupaten Sumbawa Barat adalah kabupaten dengan jumlah penduduk terkecil. Komposisi penduduk dapat dikategorikan kedalam kelompok umur muda, dimana 40,38 persen adalah penduduk dibawah 20 tahun. Sementara itu, komposisi penduduk terbanyak adalah pada kelompok umur 0-4 tahun yaitu 480.741 jiwa, terkecil pada kelompok umur 60 – 64 tahun.

Jumlah penduduk yang besar merupakan sumber daya manusia yang sangat berpengaruh terhadap perkembangan pembangunan karena perannya sebagai subyek dan sekaligus obyek pembangunan. Namun demikian, kuantitas yang besar akan efektif mendukung pembangunan jika kualitasnya memadai. Kualitas yang rendah justru menjadi beban pembangunan, alih-alih menjadi

penopang pembangunan. Beberapa indikator pembangunan sumber daya manusia menunjukkan bahwa secara umum walaupun terjadi peningkatan tetapi masih berada di level yang relatif rendah.

Kualitas sumber daya manusia yang diukur dengan indeks pembangunan manusia (IPM) menunjukkan bahwa selama kurun waktu lima tahun menunjukkan perkembangan yang positif. Pada tahun 2007, IPM provinsi Nusa Tenggara Barat adalah 63,71 meningkat menjadi 66,23 pada tahun 2011. Angka ini masih jauh lebih rendah dibandingkan dengan angka IPM nasional yang telah mencapai 73 pada tahun yang sama. Selain itu, sebaran angka IPM di tingkat kabupaten/kota belum merata. Kabupaten/kota di pulau Sumbawa relatif lebih baik kondisinya dibandingkan dengan kabupaten/kota di pulau Lombok kecuali kota Mataram. Kota Mataram memiliki angka IPM tertinggi sebesar 72,83, sementara kabupaten lainnya di pulau Lombok berada di urutan terbawah dari seluruh kabupaten/kota di provinsi Nusa Tenggara Barat. Kabupaten Lombok Utara adalah kabupaten dengan angka IPM terendah yaitu 60,93, sementara urutan kedua dan ketiga terendah adalah kabupaten Lombok Tengah dan Lombok Timur dengan IPM berturut-turut sebesar 61,66 dan 63,93.

Pembangunan di bidang pendidikan juga menunjukkan perkembangan yang positif dilihat dari beberapa indikator. Angka melek huruf di provinsi Nusa Tenggara Barat meningkat dari 80,10 persen pada tahun 2007 menjadi 97,95 persen pada tahun 2011. Rata-rata sekolah juga mengalami peningkatan yang berarti yaitu dari 6,70 pada tahun 2007 menjadi 8,00 pada tahun 2011. Proporsi penduduk usia sekolah yang mengikuti pendidikan baik di level pendidikan dasar dan menengah juga mengalami peningkatan yang signifikan. Hal ini ditunjukkan oleh meningkatnya angka partisipasi sekolah baik angka partisipasi kasar (APK) maupun angka partisipasi murni (APM) untuk berbagai level mulai dari Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama maupun Sekolah Menengah Atas. Dapat disimpulkan bahwa saat ini hampir semua penduduk usia sekolah dasar (6-12 tahun) duduk di bangku sekolah. Hal ini terlihat dari tingginya angka partisipasi murni sekolah dasar yaitu sebesar 99,03.

Angka melanjutkan sekolah juga mengalami peningkatan baik di tingkat sekolah menengah pertama maupun di sekolah menengah atas. Khusus untuk sekolah menengah pertama, semua siswa yang lulus sekolah dasar melanjutkan sekolah ke jenjang pendidikan menengah pertama. Sementara itu, 95,16% dari alumni sekolah menengah pertama melanjutkan ke sekolah menengah atas yang berarti naik dari 90,05 persen pada tahun 2007. Namun demikian, peningkatan akses pendidikan belum diikuti secara optimal oleh peningkatan mutu pendidikan. Mutu pendidikan di provinsi Nusa Tenggara Barat secara umum masih berada dibawah rata-rata nasional.

Kinerja pembangunan dibidang kesehatan juga menunjukkan kecenderungan yang positif. Hal ini ditunjukkan oleh arah perkembangan dari berbagai indikator pembangunan kesehatan seperti angka kematian bayi, angka kematian maternal, umur harapan hidup, persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan, gizi buruk dan morbiditas (kerentanan terhadap penyakit). Angka kematian bayi pada tahun 2000 adalah 78,5, kemudian menurun menjadi 62,62 pada tahun 2011. Angka kematian maternal juga mengalami penurunan dari 390 pada tahun 2000 menjadi 280,5 pada tahun 2011. Sementara itu, masyarakat menikmati hidup yang lebih lama, dimana umur harapan hidup pada tahun 2000 adalah 58,4 tahun kemudian meningkat menjadi 63 tahun pada tahun 2011. Proporsi kelahiran yang dihadiri atau ditolong oleh tenaga terampil (tenaga kesehatan) juga meningkat dari 74,88 persen pada tahun 2000 menjadi 76,44

persen pada tahun 2011. Hal yang sama juga terjadi pada tingkat gizi buruk dan morbiditas yang menunjukkan kondisi yang semakin membaik selama 10 tahun terakhir. Walaupun demikian, prestasi yang dicapai Nusa Tenggara Barat di bidang kesehatan masih berada di bawah rata-rata nasional, bahkan angka kematian bayi dan kematian maternal termasuk yang tertinggi di Indonesia. Hal ini menjadi tantangan yang besar pemerintah dan masyarakat Nusa Tenggara Barat untuk berupaya sekuat tenaga mengejar ketertinggalannya.

Pembangunan di bidang ketenagakerjaan telah menunjukkan beberapa kemajuan yang berarti. Proporsi penduduk berumur dibawah 15 tahun telah menurun dari 35 persen pada tahun 2000 menjadi 30,1 persen pada tahun 2011. Sementara proporsi penduduk berumur diatas 64 tahun mengalami peningkatan dari 3,63 persen pada tahun 2000 menjadi 4,7 persen pada tahun 2011. Perubahan komposisi penduduk ini menyebabkan perubahan angka beban tanggungan (dependency ratio) penduduk. Jika pada tahun 2007 angka beban tanggungan penduduk sebesar 58,46 persen, maka pada tahun 2011 angka tersebut menurun menjadi 55,17 persen.

Namun demikian, kualitas tenaga kerja di Nusa Tenggara Barat relatif masih rendah. Kualifikasi pendidikan tenaga kerja masih didominasi oleh pendidik dasar yaitu sebesar 62,71 persen pada tahun 2011. Angka ini sedikit lebih baik dibandingkan dengan tahun 2007 dimana 64,48 persen tenaga kerja berpendidikan sekolah dasar kebawah. Rendahnya kualitas tenaga kerja berpengaruh terhadap daya saing akibat dari rendahnya kompetensi tenaga kerja. Kondisi ini dilain pihak tidak membawa pengaruh yang signifikan terhadap tingkat pengangguran karena angka pengangguran tidak semata-mata dipengaruhi oleh kualitas tenaga kerja tetapi juga oleh pertumbuhan ekonomi, investasi, dan kondisi lingkungan eksternal dan internal dari sektor usaha. Pada tahun 2007 angka pengangguran tercatat sebesar 4,47 persen, sementara pada tahun 2009 meningkat menjadi 6,25 persen kemudian turun menjadi 5,33 persen pada tahun 2011.

Persebaran tenaga kerja menurut sektor masih didominasi oleh sektor pertanian. Pada tahun 2011, sebanyak 44,44 persen tenaga kerja bekerja di sektor pertanian sementara itu pada tahun 2007 masih sebesar 47,41 persen. Ini menunjukkan adanya pergeseran atau penurunan peran sektor pertanian dalam menyediakan kesempatan kerja kepada tenaga kerja. Sektor lain yang menunjukkan peran yang semakin besar dalam menyediakan kesempatan kerja adalah sektor Perdagangan, Hotel & Restoran; pertambangan dan penggalian; dan listrik, gas dan air bersih. Sementara itu, sektor lainnya mengalami penurunan peran dalam menyediakan kesempatan kerja.

Penduduk miskin di Nusa Tenggara Barat terus mengalami penurunan baik dilihat dari persentase penduduk miskin maupun jumlah absolutnya. Jika pada tahun 2007 persentase penduduk miskin adalah sebesar 24,99 persen atau sama dengan 1.118.452 jiwa maka pada tahun 2011 turun menjadi 19,67 persen dengan jumlah 896.160 jiwa. Penurunan angka kemiskinan menunjukkan tumbuh dan berkembangnya kegiatan ekonomi masyarakat akibat dari berbagai program dan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha. Selain itu, stabilitas ekonomi di tingkat regional, nasional, dan internasional turut memberi andil bagi terciptanya pertumbuhan ekonomi yang positif, berkualitas (inklusif), dan berkelanjutan. Tantangan kedepan adalah mempertahankan trend pertumbuhan yang positif sehingga angka kemiskinan bisa turun hingga mencapai angka rata-rata nasional atau mencapai nilai satu digit.

Sejalan dengan peningkatan angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) kualitas hidup masyarakat semakin membaik. Hal ini ditunjukkan salah satunya oleh keberhasilan kontingan Nusa Tenggara Barat dalam Pekan Olahraga Nasional (PON) XVIII 2013 di Pekanbaru Riau. Kontingen Nusa Tenggara Barat berhasil memperoleh medali sebanyak 24 dengan rincian 11 medali emas, 5 medali perak, dan 8 medali perunggu. Dengan peroleh medali tersebut menempatkan Nusa Tenggara Barat dalam urutan ke 12 dari 33 provinsi yang berlaga di PON. Inilah prestasi tertinggi yang pernah diraih Nusa Tenggara Barat selama mengikuti PON. Posisi ini menunjukkan bahwa pembangunan sumber daya manusia khususnya di bidang pemuda dan olah raga mengalami kemajuan yang signifikan. Kemajuan di bidang olah raga juga menjadi salah satu indikator kemajuan suatu bangsa karena kemajuan di bidang olah raga berbanding lurus dengan kemajuan di bidang lainnya seperti kemajuan ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan kebudayaan.

Pembangunan bidang budaya terus diupayakan melalui peningkatan pemahaman terhadap keragaman budaya, pentingnya toleransi, dan pentingnya penyelesaian masalah tanpa kekerasan, serta berkembangnya interaksi antarbudaya. Demikian juga penghargaan terhadap nilai-nilai budaya lokal dan bahasa daerah, nilai-nilai solidaritas sosial, kekeluargaan rasa cinta tanah air terus dikembangkan. Berbagai konflik baik horizontal dan vertikal yang terjadi cenderung semakin berkurang. Jika pada tahun 2007 terdapat 153 konflik vertikal dan 132 konflik horizontal, maka pada tahun 2011 menurun menjadi 61 konflik vertikal dan 36 konflik horizontal. Penurunan frekuensi konflik tersebut disebabkan antara lain oleh intervensi kebijakan pemerintah daerah terutama dalam mendorong terciptanya harmonisasi dan melakukan antisipasi potensi konflik sedini mungkin. Selain itu, peran serta para pemangku kepentingan (pemerintah, masyarakat, dan organisasi masyarakat sipil) dalam menyelesaikan potensi konflik dan potensi gangguan semakin meningkat. Berbagai forum komunikasi dan kerja sama antar berbagai elemen masyarakat turut mengeliminir potensi konflik yang ada di masyarakat.

Kehidupan beragama di Nusa Tenggara Barat semakin membaik yang ditandai dengan meningkatnya kesadaran melaksanakan ibadah keagamaan dan meningkatnya pembangunan sarana peribadatan. Di kalangan pemuka agama juga tumbuh kesadaran untuk membangun harmoni sosial dan hubungan intern dan antarumat beragama yang aman, damai, dan saling menghargai. Walaupun demikian, kualitas keimanan dan ketaqwaan belum begitu baik, kerukunan intern dan antarumat beragama juga belum berhasil dengan baik di tingkat masyarakat. Ajaran-ajaran agama mengenai etos kerja, penghargaan pada prestasi dan dorongan mencapai kemajuan belum sepenuhnya dapat diwujudkan sebagai inspirasi yang mampu menggerakkan masyarakat dalam membangun. Pesan-pesan agama juga belum bisa diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Pemerintah telah memulai pembangunan Islamic Center yang akan menjadi pusat orbit bagi keberadaan ribuan masjid di Lombok dan Sumbawa. Selain itu, pemerintah juga terus membangun perpustakaan bagi rumah ibadat dalam jumlah yang cukup signifikan. Pada tahun 2007 terdapat hanya 82 perpustakaan rumah ibadah, dan pada tahun 2011 angka tersebut meningkat menjadi 508 perpustakaan.

B. Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Nusa Tenggara Barat selama kurun waktu lima tahun terakhir secara umum mengalami trend yang positif. Pada tahun 2006 pertumbuhan ekonomi Nusa Tenggara Barat adalah 2,77 persen dan 4,95 persen

tanpa subsektor pertambangan non migas. Angka ini mengalami fluktuasi tetapi masih tetap tumbuh hingga tahun 2010. Pada tahun 2011 terjadi kontraksi dimana pertumbuhan ekonomi Nusa Tenggara Barat adalah -3,18 persen. Namun demikian, pertumbuhan ekonomi tanpa subsektor pertambangan nonmigas tetap positif yaitu sebesar 5,57 persen. Pertumbuhan negatif yang terjadi pada tahun 2011 disebabkan oleh menurunnya produksi yang dihasilkan dari aktivitas sektor pertanian, pertambangan dan penggalian. Penurunan produksi sektor pertanian terjadi pada subsektor tanaman pangan, perkebunan, dan perikanan. Sementara itu, penurunan subsektor pertambangan disebabkan oleh turunnya produksi konsentrat tembaga yang dihasilkan oleh PT. Newmont Nusa Tenggara. Kinerja perekonomian Nusa Tenggara Barat tersebut masih berada jauh di bawah kinerja perekonomian nasional yang terus tumbuh di atas 6 persen per tahun.

Struktur perekonomian Nusa Tenggara Barat masih didominasi oleh sektor pertanian dan pariwisata. Kontribusi sektor pertanian dalam pembentukan produksi domestik regional bruto pada tahun 2011 berdasarkan harga berlaku adalah 22,92 persen, sementara sektor pariwisata (perdagangan, hotel dan restoran) menyumbang 14,88 persen. Angka ini tentu saja lebih kecil dibandingkan dengan sumbangan sektor pertambangan dan penggalian yaitu sebesar 26,83 persen pada tahun yang sama. Namun demikian, sumbangan sektor pertambangan dan penggalian terhadap kesempatan kerja hanya sebesar 2,53 persen, sementara sektor pertanian dan pariwisata secara berturut-turut adalah sebesar 44,44 persen dan 18,47 persen. Ini menunjukkan bahwa sektor pertanian dan pariwisata menjadi tumpuan hidup dari sebagian besar penduduk Nusa Tenggara Barat.

Pemerintah juga telah berhasil mempertahankan stabilitas ekonomi melalui pengendalian laju inflasi yang efektif. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir laju inflasi di Nusa Tenggara Barat berfluktuasi dengan kecenderungan menurun. Jika pada tahun 2007 laju inflasi mencapai 8,75 persen, maka pada tahun 2011 turun menjadi 6,59 persen. Pada tahun sebelumnya laju inflasi mencapai 10,08 yang disebabkan oleh kenaikan harga bahan pangan terutama meningkatnya harga beras dan cabai pada triwulan terakhir tahun 2010. Melalui koordinasi dan intervensi yang terukur dan konsisten pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya laju inflasi mengalami penurunan pada tahun berikutnya.

Investasi di Nusa Tenggara Barat baik yang berasal dari penanaman modal dalam negeri (PMDN) dan penanaman modal asing (PMA) belum menunjukkan kinerja yang optimal. Selama kurun waktu 2006-2011 investasi PMDN dan PMA mengalami fluktuasi dengan kecenderungan semakin menurun. Investasi PMDN pada tahun 2006 adalah sebesar Rp 941.679.914.000, kemudian menurun menjadi Rp 624.595.612.716. Sementara itu, pada tahun 2010 bahkan tidak ada investasi yang direalisasikan baik PMDN maupun PMA. Realisasi PMA pada tahun 2006 adalah sebesar USD 3.019.633.000 kemudian menurun hingga tidak ada realisasi investasi pada tahun 2009 dan 2010. Pada tahun 2011, realisasi investasi yang berasal dari PMA meningkat hingga mencapai nilai USD 2.859.685.040. Nilai investasi yang terbesar adalah di sektor pertambangan dan penggalian, pariwisata, perdagangan dan agribisnis. Hal ini sejalan dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Nusa Tenggara Barat.

Pembangunan di bidang koperasi dan usaha mikro kecil menengah (UMKM) telah menunjukkan kinerja yang positif. Pembangunan dibidang koperasi diarahkan untuk mewujudkan koperasi berkualitas dalam jumlah yang semakin banyak. Jika pada tahun 2007 jumlah koperasi yang diklasifikasikan sebagai koperasi berkualitas hanya 940 maka pada tahun 2011 jumlahnya meningkat

menjadi 2.172 koperasi. Sementara itu, jumlah pengusaha yang tergolong dalam kelompok UMKM terus meningkat. Hal ini sejalan dengan komitmen komitmen yang diwujudkan dalam program pengembangan wirausaha baru dimana pada periode kedua dari RPJPD ini ditargetkan sebanyak 100.000 orang pengusaha.

C. Sarana dan Prasarana Wilayah

Pembangunan sarana dan prasarana transportasi seperti jalan, jembatan, pelabuhan baik darat, laut dan udara terus mengalami perkembangan yang positif. Kondisi kemandapan jalan negara dan jalan provinsi terus mengalami kemajuan yang cukup signifikan. Pada tahun 2005, dari jalan negara yang panjangnya 601,83 km kurang dari 50 persen dalam kondisi baik atau tingkat kemandapannya hanya 48,34 persen. Sementara itu, pada tahun yang sama panjang jalan provinsi adalah 1.842,33 km dengan tingkat kemandapan hanya 27,47 persen. Pada tahun 2011, tingkat kemandapan baik jalan negara maupun jalan provinsi mengalami peningkatan yang cukup signifikan dimana kemandapan jalan negara mencapai 85,57 persen, sedangkan jalan provinsi 53,15 persen. Kondisi ini tentu belum ideal mengingat seharusnya kondisi kemandapan jalan harus 100 persen.

Ketersediaan sarana dan prasarana transportasi akan mempermudah proses pembangunan wilayah-wilayah terpencil dan terisolir karena transportasi berperan sebagai katalisator dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan pembangunan wilayah. Selain itu, sarana dan prasarana transportasi mengemban fungsi pelayanan publik disatu sisi, sedangkan disisi lain ia adalah entitas industri jasa. Dengan demikian, transportasi berperan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan jasa transportasi yang mudah diakses dan menjangkau seluruh wilayah termasuk daerah pedesaan dan daerah terpencil serta wilayah pedalaman dan terisolasi. Dengan demikian, mobilitas manusia dan konektivitas (distribusi) barang dan jasa ke berbagai wilayah menjadi lancar dan cepat sehingga kegiatan ekonomi menjadi lebih efisien.

Sebagai daerah dengan potensi ekonomi dominan di sektor pertanian dan pariwisata, maka transportasi memegang peranan yang sangat signifikan. Oleh karena itu, keberadaan Bandara Internasional Lombok (BIL) yang diresmikan pada tahun 2010 oleh Presiden Republik Indonesia menjadi momentum sekaligus pendorong pertumbuhan perdagangan dan pariwisata. Dengan kapasitas yang semakin besar, BIL dapat membuka rute-rute baru yang lebih luas hingga ke manca negara. Arus barang dan jasa serta mobilitas kunjungan wisatawan semakin meningkat sehingga mendorong tumbuhnya sektor perdagangan dan industri jasa wisata. Kehadiran BIL juga sejalan dengan rencana pemerintah menetapkan wilayah Nusa Tenggara Barat dalam Koridor V Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (2012-2025) untuk menjadi pusat pengembangan (pintu gerbang) pariwisata nasional dan pendukung pangan nasional. Untuk mendukung konektivitas wilayah pemerintah melalui program MP3EI merencanakan membangun Pelabuhan Nusantara di Lombok Utara dan di Ekas Lombok Timur dalam waktu dekat.

Pemenuhan kebutuhan air bersih untuk penduduk terus berkembang dengan trend yang positif. Cakupan air bersih untuk penduduk pada tahun 2007 untuk wilayah perkotaan adalah sebesar 74 persen, sementara untuk wilayah pedesaan mencapai 65 persen. Angka ini meningkat pada tahun 2011 menjadi 78,30 persen untuk wilayah perkotaan dan 70,25 persen untuk wilayah pedesaan. Jumlah desa terlayani air bersih diatas 65 persen adalah 707 desa pada tahun 2007, dan meningkat menjadi 866 desa pada tahun 2011. Air bersih tersebut

diperoleh berbagai sumber seperti mata air, sumur bor (artesis), waduk/bendungan, sumur pompa, sumur gali dan pengolahan air dari sungai. Penyediaan air bersih untuk wilayah/kawasan kritis air menjadi tantangan tersendiri karena membutuhkan investasi yang besar untuk membangun infrastruktur jaringan air bersih. Keterbatasan tersebut saat ini ditanggulangi dengan menyediakan melalui penggunaan tangki-tangki air.

Ketersediaan energi listrik di Nusa Tenggara Barat yang sangat terbatas menyebabkan terjadinya krisis listrik sejak tahun 1998 ketika krisis ekonomi mulai berlangsung. Namun demikian, pembangunan dibidang kelistrikan yang dilakukan pemerintah selama ini telah berhasil mengatasi krisis tersebut dan meningkatkan rasio elektrifikasi dari hanya 34 persen pada tahun 2007 menjadi 49,85 persen pada tahun 2011. Jika dilihat per desa, maka pada tahun 2011 hampir semua desa telah memperoleh aliran listrik walaupun dengan jumlah/proporsi kepala keluarga (KK) yang terbatas. Dengan kata lain, hampir tidak ada desa yang tidak mendapatkan aliran listrik. Pada tahun 2011 produksi tenaga listrik di Nusa Tenggara Barat mencapai 849,21 MW yang diperoleh dari berbagai sumber selain dari listrik dengan bahan bakar minyak seperti pembangkit listrik tenaga surya, pembangkit listrik tenaga mikro hidro. Kedepan pemerintah telah merencanakan membangun pembangkit listrik tenaga uap, tenaga angin, tenaga arus laut (kobold) dan tenaga panas bumi. Ketersediaan energi listrik yang memadai menjadi salah daya tarik investasi di wilayah Nusa Tenggara Barat sehingga meningkatkan daya saing wilayah.

Pembangunan di bidang teknologi telekomunikasi dan informasi telah memungkinkan masyarakat di berbagai wilayah di Nusa Tenggara Barat terhubung dengan wilayah lainnya. Pada tahun 2008, data yang tersedia menunjukkan bahwa ketersediaan infrastruktur komunikasi terutama jaringan telepon seluler telah mencapai 94,63 persen. Ini menunjukkan bahwa hampir semua wilayah telah dapat terhubung dengan menggunakan jaringan telepon seluler. Tersedianya jaringan telepon seluler memungkinkan masyarakat mengakses internet yang merupakan pintu gerbang menuju dunia maya. Selain itu, ketersediaan infrastruktur internet mendorong tumbuh dan berkembangnya berbagai industri perdagangan dan jasa karena sebagian dari industri tersebut berbasis teknologi komunikasi dan informasi.

2.2. Modal Dasar Pembangunan

Modal bagi pembangunan daerah Nusa Tenggara Barat terdiri berbagai kekuatan baik yang potensial maupun efektif. Modal tersebut terdiri dari modal berupa sumber daya alam, sumber daya manusia, modal sosial dan budaya, dan modal politik. Berbagai potensi sumber daya di Nusa Tenggara Barat yang meliputi sumber daya pertanian tanaman pangan, kelautan dan perikanan, pesisir dan pulau-pulau kecil, perkebunan dan kehutanan belum dimanfaatkan secara optimal dan dikelola secara modern bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat. Demikian pula halnya dengan sumber daya mineral yang masih terkandung dalam perut bumi seperti Emas, Tembaga, Pasir kuarsa, Batu silika, Kalsit, Batu apung, Batu kapur, Marmer, Tras, Tanah liat, Perlit, Batu bangunan (Andesit, Deorit dan Dasit), Sirtu, Zeolit, Belerang, dan Pasir besi yang pemanfaatannya masih sangat terbatas. Selain itu, terdapat pula potensi energi yang bersumber dari panas bumi, tenaga air (mikro hidro), tenaga uap, tenaga angin, dan tenaga arus laut (kobold) yang dapat dimanfaatkan untuk dijadikan pembangkit tenaga listrik.

Selain itu, Nusa Tenggara Barat juga memiliki potensi sumber daya bagi pengembangan pariwisata berupa 15 kawasan pengembangan wisata. Sebanyak 9

kawasan pengembangan di Pulau Lombok dan 6 kawasan pengembangan di Pulau Sumbawa. Kesembilan kawasan pengembangan di Pulau Lombok adalah: Kawasan Senggigi dan sekitarnya; Kawasan Gili Gede dan sekitarnya; Kawasan Suranadi dan sekitarnya; Kawasan Pantai Kute dan sekitarnya; Kawasan Selong Belanak dan sekitarnya; Kawasan Desa Adat Sade dan sekitarnya; Kawasan Gili Indah dan sekitarnya; Kawasan Gunung Rinjani dan sekitarnya; dan Kawasan Gili Sukat dan sekitarnya. Keenam kawasan pengembangan di Pulau Sumbawa adalah: Kawasan Pulau Moyo; Kawasan Pantai Maluku; Kawasan Pantai Hu'u; Kawasan Tambora; Kawasan Teluk Bima; dan Kawasan Sape dan sekitarnya.

Berbagai komoditi tanaman pangan juga tersedia di Nusa Tenggara Barat seperti padi, palawija, dan hortikultura (sayur-sayuran dan buah-buahan). Padi, palawija, dan sayur-sayuran, baik produksi, luas panen dan produktivitasnya sejak tahun 2007 terus mengalami fluktuasi. Buah-buahan, produksi dan jumlah pohonnya terus mengalami peningkatan. Produksi dan luas panen padi di NTB tidak konsisten dan ada kecenderungan menurun, sementara produktivitas padi kecenderungannya meningkat dengan tingkat produktivitas yang berfluktuasi. Komoditi palawija, seperti jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, ubi kayu, baik produksi, luas panen dan produktivitasnya masih relatif rendah dan masih besar peluang untuk meningkatkannya. Sayur-sayuran terdiri dari Bawang merah, Bawang putih, Kangkung, dan Cabe produksinya masih rendah, dan peluang untuk menambah luas panen dan meningkatkan produktivitas masih besar. Untuk komoditi buah-buahan terdiri dari Mangga, Durian, Nangka, Pepaya, Sawo, Jambu biji, Jambu air, Pisang dan Nanas memerlukan penanganan dari semua sistem agribisnis sebab pengembangannya sangat menjanjikan.

Komoditi perkebunan di Nusa Tenggara Barat terdiri dari 20 jenis yang dikelompokkan dalam tiga kelompok pengembangan. Kelompok I terdiri dari kelapa, jambu mete, kapuk, asam, jarak, kapas, wijen, dan lontar. Komoditas seperti kopi, cengkeh, kakao, vanili, pala, lada, kemiri, dan enau masuk dalam kelompok II. Sementara itu, yang termasuk dalam Kelompok III, adalah tembakau rakyat, tembakau virginia, dan tebu. Potensi untuk pengembangan komoditi perkebunan masih sangat luas baik untuk kelompok I, II dan III. Komoditi perkebunan yang punya potensi besar untuk dikembangkan adalah Kelapa, Kopi, Jambu Mete, Tembakau Rakyat, Tembakau Virginia dan Jarak. Namun demikian, sejak dihapuskannya subsidi minyak tanah, perkebunan tembakau rakyat maupun tembakau virginia mengalami kemunduran akibat mahalannya pengovenan tembakau. Oleh karena itu, perlu diupayakan untuk mendapatkan energi alternatif yang lebih efisien sebagai pengganti minyak tanah.

Potensi sumber daya perikanan yang terdiri dari perikanan laut dan perikanan darat belum dimanfaatkan secara optimal. Perikanan laut meliputi perikanan tangkap, perikanan budidaya, budidaya rumput laut, dan budidaya mutiara. Wilayah Nusa Tenggara Barat sudah dikenal sebagai pusat budidaya mutiara dan pengembangan industri kerajinan mutiara. Ini merupakan modal dasar untuk mengembangkan potensi tersebut menjadi industri dengan meningkatkan kandungan modal (kedalaman) dalam industri tersebut. Demikian juga perikanan darat yang terdiri dari penangkapan, budidaya payau (tambak), kolam, keramba dan budidaya sawah (mina padi dan mina kangkung) belum berkembang secara optimal dan pengelolaannya sebagian masih tradisional.

Pengembangan tiga komoditas unggulan Nusa Tenggara Barat seperti sapi, jagung, dan rumput laut (Pijar) telah menunjukkan trend yang positif. Pada tahun 2007 populasi sapi tercatat sebanyak 507.836 ekor. Populasi tersebut meningkat menjadi 784.019 ekor pada tahun 2011. Hal yang sama terjadi pada komoditas

jagung dimana pada tahun 2007 produksi jagung hanya 196.263 ton, kemudian meningkat menjadi 456.915 ton pada tahun 2011. Pengembangan budidaya rumput laut juga berkembang sangat pesat dalam lima tahun terakhir. Produksi rumput laut yang dicapai pada tahun 2007 hanya 116.000 ton. Angka ini meningkat menjadi 457.914 ton pada tahun 2011. Keseriusan pemerintah dalam mengembangkan produksi ketiga komoditas unggulan tersebut diikuti pula dengan pengembangan industri agribisnis jagung dan rumput laut. Selain itu, untuk mendukung pengembangan ketiga komoditas tersebut pemerintah telah menyiapkan Sekolah Menengah Kejuruan Pertanian Pembangunan Negeri (SMK PPN) yang didirikan di Kota Mataram dan Kota Bima.

Jumlah penduduk yang mencapai 4,5 juta merupakan modal yang besar untuk membangun daerah. Jumlah yang sedemikian besar akan menjadi modal yang efektif kalau kualitasnya (diukur dari tingkat produktivitas) tinggi. Akan tetapi, jika penduduk yang besar tetapi tidak berkualitas maka ia akan menjadi beban dalam pembangunan. Oleh karena itu, upaya peningkatan mutu dan kompetensi sumber daya manusia menjadi keniscayaan karena sumber daya yang sebelumnya dianggap beban kini berubah menjadi modal yang efektif.

Masyarakat Nusa Tenggara Barat yang terdiri dari tiga suku besar dengan budaya masing-masing merupakan modal bagi pengembangan industri jasa wisata. Budaya yang berbeda-beda menjadi daya tarik bagi orang luar untuk mengetahui dan mempelajarinya sehingga mendorong tingkat kunjungan wisatawan ke Nusa Tenggara Barat. Selain itu, nilai-nilai budaya yang positif seperti tertera dalam slogan berbagai daerah (patuh, patut, patju: tatas, tuhu, trasna; nggahi rawi pahu, ngaha aina ngoho, patuh karya, sabalong samalewa) menjadi inspirasi dan pemicu untuk bekerja keras dan bekerja cerdas dalam rangka meningkatkan taraf hidup.

Perubahan pola pemerintahan dari sentralisasi menjadi desentralisasi telah memberikan peluang yang besar bagi daerah untuk mempercepat proses pembangunan daerah. Daerah memiliki kewenangan untuk menentukan apa yang terbaik untuk daerahnya sehingga program-program pembangunan yang dirancang dapat menyelesaikan persoalan yang ada di masyarakat. Orang daerah tentu lebih mengetahui segala segi dari berbagai persoalan yang dihadapi daerah dibanding orang pusat. Namun demikian, penerapan desentralisasi dan otonomi daerah seringkali memunculkan sentimen kedaerahan sehingga seringkali menghambat peluang bagi putra bangsa terbaik untuk berpartisipasi dalam mengelola pembangunan daerah.

2.3. TANTANGAN KE DEPAN

Sebagai konsekuensi komitmen pemerintah bersama dengan 189 negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa lainnya untuk mewujudkan Millenium Development Goals (MDGs) pada tahun 2015, maka pemerintah harus berupaya keras mewujudkan tujuan pembangunan milenium tersebut. Ada 8 tujuan pembangunan milenium (MDGs) yaitu menghilangkan angka kemiskinan absolut dan kelaparan; memberlakukan pendidikan dasar yang universal; mengembangkan kesetaraan dan pemberdayaan perempuan; menurunkan angka kematian anak; memperbaiki kesehatan maternal; memerangi HIV/AIDS, malaria dan penyakit lainnya; menjamin kesinambungan lingkungan hidup; dan membangun kemitraan global untuk pembangunan. Tujuan tersebut harus diwujudkan pada tahun 2015. Hal ini bukanlah pekerjaan yang mudah mengingat target yang ditetapkan dalam MDGs tersebut khususnya untuk Nusa Tenggara Barat masih sulit untuk dicapai terutama untuk angka kemiskinan dan kelaparan

dan juga penurunan angka kematian bayi dan maternal. Namun demikian, target MDGs ini menjadi tantangan yang harus dihadapi oleh pemerintah daerah.

Tantangan lain terkait dengan perkembangan penduduk, jumlah penduduk terus meningkat dan diperkirakan akan mencapai puncaknya pada tahun 2030. Bagi Indonesia, periode 2015 - 2025 merupakan sebuah periode emas, yang berarti pada masa itu proporsi penduduk usia produktif mencapai jumlah tertinggi sepanjang sejarah dan hal tersebut hanya akan dicapai satu kali dalam perjalanan sebuah bangsa. Hal tersebut merupakan peluang bagi Indonesia karena penduduk merupakan asset penting yang harus dimanfaatkan seoptimal mungkin untuk kepentingan pembangunan secara keseluruhan.

Bersama dengan laju pembangunan yang semakin meningkat, berbagai fenomena juga semakin terasa antara lain peningkatan kerusakan dan polusi lingkungan, peningkatan kebutuhan pangan, peningkatan produk industri untuk pemenuhan kebutuhan penduduk, serta peningkatan produksi bahan bakar minyak dan sumber energi lain guna mendukung proses industrialisasi, konsumsi energi transportasi, dan domestik. Namun, di sisi lain ketersediaan sumber daya alam yang terbatas menunjukkan laju pengurangan yang cukup tajam.

Permintaan akan sumber daya alam untuk pemenuhan pembangunan pada saatnya akan sampai pada titik jenuh, karena keterbatasan daya dukung lingkungan. Dampaknya berantai dan berlipat ganda terhadap proses pembangunan berikutnya. Kemungkinan yang terjadi adalah terganggunya berbagai proses pembangunan apabila tidak ada intervensi atau upaya mengatasi kondisi yang berlangsung. Pengendalian populasi penduduk, pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan, penggunaan teknologi, laju pembangunan ekonomi, khususnya industrialisasi, merupakan faktor-faktor utama yang mempengaruhi prediksi kondisi pembangunan jangka panjang ke depan.

Nusa Tenggara Barat akan menghadapi tekanan jumlah penduduk yang semakin besar, terutama di Pulau Lombok. Sejalan dengan itu, beberapa parameter demografi diperkirakan akan mengalami perbaikan yang ditunjukkan dengan menurunnya angka kelahiran, meningkatnya usia harapan hidup, dan menurunnya angka kematian bayi. Meskipun demikian, pengendalian kuantitas dan laju pertumbuhan penduduk harus menjadi perhatian utama dalam rangka mendukung terwujudnya bonus demografi yang ditandai dengan jumlah penduduk usia produktif lebih besar dari pada jumlah penduduk usia tidak produktif. Kondisi demografi tersebut perlu dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan kualitas SDM, daya saing dan kesejahteraan masyarakat.

Tantangan dalam pengendalian kuantitas dan laju pertumbuhan penduduk adalah menciptakan penduduk tumbuh seimbang sehingga terjadinya bonus demografi yang ditandai dengan penduduk usia produktif lebih besar dari penduduk usia non-produktif. Kondisi tersebut perlu dimanfaatkan secara optimal yang ditunjukkan dengan tingginya tingkat tabungan masyarakat yang dapat diinvestasikan untuk peningkatan kualitas SDM dan meningkatkan daya saing. Tantangan lainnya berkaitan dengan persebaran dan mobilitas penduduk.

Pertumbuhan ekonomi NTB makin pesat sehingga semakin didorong dengan penyediaan berbagai sarana dan prasarana perekonomian penting yang dibutuhkan untuk mempercepat pembangunan ekonomi. Selanjutnya dalam periode tersebut akan terus diupayakan secara bertahap perubahan struktur ekonomi yang pada saat ini masih bertumpu pada sektor pertanian berubah ke arah kegiatan ekonomi non pertanian dengan penggerak sektor industri seperti pariwisata, perikanan, pengolahan hasil pertanian untuk mendapatkan nilai tambah yang lebih tinggi. Peningkatan mutu dan daya saing produk lokal akan

menjadi tantangan. Akan terus diupayakan peningkatan kemampuan untuk menghasilkan produk lokal yang mempunyai daya saing tinggi baik pada level nasional maupun Internasional.

Perekonomian NTB akan ditata lebih baik agar pertumbuhan ekonomi cukup tinggi secara berkelanjutan dan stabilitas perekonomian terjaga dalam rangka mewujudkan secara nyata peningkatan kesejahteraan masyarakat sekaligus mengejar ketertinggalan dari daerah-daerah lain yang telah lebih dulu maju. Secara bertahap struktur ekonomi berubah dari yang semula didominasi oleh pertanian tradisional ke arah kegiatan ekonomi sekunder dan tersier yang lebih modern dengan berorientasi pada meningkatkan komoditi ekspor.

Angkatan kerja diperkirakan akan meningkat hampir dua kali lipat dari kondisi saat ini dengan tingkat pendidikan angkatan kerja setara dengan SMP/MTs sampai dengan SMA/MA. Diversifikasi ekonomi akan lebih ditingkatkan sekaligus perbaikan dalam kesempatan kerja dan berusaha. Aktivitas perekonomian akan didukung oleh penguasaan dan penerapan teknologi serta peningkatan produktivitas tenaga kerja, mengembangkan kelembagaan ekonomi yang efisien dengan menerapkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (good governance) serta menjamin ketersediaan kebutuhan dasar masyarakat.

Penanggulangan kemiskinan perlu didasarkan pada pemahaman suara masyarakat miskin dan adanya penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar rakyat secara bertahap. Dengan demikian, pemahaman terhadap hak-hak dasar rakyat akan ditingkatkan dalam perencanaan dan penganggaran, dalam koordinasi penanggulangan kemiskinan antara pemerintah pusat dan daerah, disamping terus meningkatkan partisipasi masyarakat, dan membuka akses masyarakat miskin dalam pengambilan keputusan.

Pemanfaatan dan pemeliharaan Sumberdaya alam daratan, seperti kehutanan, pertambangan dan pemanfaatan lahan budidaya pertanian, peternakan akan terus ditingkatkan. Disamping itu, potensi kelautan akan dioptimalkan pemanfaatannya untuk perhubungan laut, perikanan, jasa kelautan dan pariwisata. Terlebih lagi mutiara sebagai sektor hulu dari industri mutiara yang memiliki keterkaitan terbesar dalam industri pariwisata Nusa Tenggara Barat.

Di sektor pariwisata di prediksi bahwa masalah Carrying Capacity kawasan pariwisata harus terus ditingkatkan agar mampu mendukung aktivitas wisata. Kedatangan wisatawan tidak saja membawa dampak ekonomi bagi masyarakat tapi juga akan membawa dampak negatif berupa pengaruh budaya asing menyebabkan rapuhnya norma kehidupan masyarakat. Hal ini harus secara sistematis dieliminir. Keterbatasan kemampuan yang dimiliki menghambat berkembangnya pariwisata, kurang beragamnya aneka wisata di obyek wisata. Obyek wisata harus terus ditata dengan baik, promosi dan pemasaran wisata yang intensif disertai dengan peningkatan pelibatan masyarakat harus menjadi elemen penting dalam upaya peningkatan sektor pariwisata dua puluh tahun ke depan.

Rendahnya kualitas SDM NTB yang diukur dengan IPM mengakibatkan rendahnya produktivitas dan daya saing perekonomian daerah. Pembangunan kesehatan dan pendidikan memiliki peran penting dalam peningkatan kualitas SDM. Pembangunan bidang kesehatan di NTB harus dapat menekan angka kematian bayi, balita dan ibu melahirkan, serta meniadakan balita kurang gizi. Disamping itu, secara bertahap akan diperbaiki kesenjangan status kesehatan dan akses terhadap pelayanan kesehatan antarwilayah, gender, dan kelompok pendapatan. Pembangunan bidang pendidikan adalah menyediakan pelayanan pendidikan yang berkualitas untuk meningkatkan proporsi penduduk yang menyelesaikan pendidikan dasar ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi,

menurunkan angka penduduk buta aksara, dan menurunkan kesenjangan tingkat pendidikan antarkelompok masyarakat termasuk antarpenduduk kaya dan miskin, antarwilayah perkotaan dan perdesaan, dan antarjenis kelamin.

Dengan makin meningkatnya persaingan dan meningkatnya penggunaan teknologi pada semua bidang pekerjaan diperlukan peningkatan kualitas tenaga kerja karena jika hal itu tidak menjadi perhatian kedepan maka akan berpengaruh pada rendahnya daya serap atau adaptabilitas masyarakat terhadap teknologi, dan berdampak pada kurang berkembangnya teknologi sehingga kurang mendukung pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian maka kondisi perlindungan tenaga kerja diharapkan akan menjadi mapan sehingga tingkat pengangguran dapat ditekan dan kesejahteraan pekerja dapat meningkat.

Peran dan kualitas hidup perempuan dan anak akan terus ditingkatkan dan mengurangi kekerasan terhadap perempuan dan anak. Disamping itu, tingkat kesejahteraan, partisipasi dan perlindungan perempuan akan ditingkatkan secara bertahap, meningkatkan partisipasi pemuda dalam pembangunan, meningkatkan budaya dan prestasi olahraga. Kesejahteraan sosial akan terus ditingkatkan, dan sekaligus memenuhi kebutuhan sosial dasar masyarakat. Nilai-nilai budaya lokal yang unggul akan terus ditingkatkan sekaligus memanfaatkannya untuk pengembangan toleransi terhadap keragaman budaya dan peningkatan daya saing daerah.

Dengan semakin derasnya arus globalisasi, pembangunan agama akan terus ditingkatkan dengan mewujudkan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari dan mewujudkan kerukunan antar dan intern umat beragama. Peningkatan kesadaran tersebut diupayakan untuk sepenuhnya menjamin kualitas keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Perilaku asusila, praktik korupsi, kolusi dan nepotisme, penyalahgunaan narkoba, pornografi, pornoaksi, perjudian, tingginya angka perceraian dan ketidakharmonisan keluarga antara ajaran agama dengan pemahaman dan pengamalannya akan terus dipertahankan. Selanjutnya upaya membangun kerukunan intern agama Islam sebagai mayoritas di Propinsi NTB dan antarumat juga perlu dipertahankan tingkat keberhasilannya dengan baik terutama di tingkat masyarakat. Ajaran-ajaran agama mengenai etos kerja, penghargaan pada prestasi dan dorongan mencapai kemajuan diupayakan untuk mampu diwujudkan sebagai inspirasi yang mampu menggerakkan masyarakat Provinsi NTB untuk membangun. Demikian pula pesan-pesan moral agama diusahakan sepenuhnya dapat diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari, akhlak mulia dan terinternalisasi dalam setiap individu.

Pembangunan bidang politik adalah menjaga proses konsolidasi demokrasi lokal secara berkelanjutan dengan melaksanakan reformasi struktur politik, proses dan budaya politik demokratis. Diharapkan terus ditingkatkannya kualitas pendidikan politik bagi masyarakat, kebebasan dalam mengemukakan pendapat menjadi lebih baik, terus meningkatnya kualitas dan fungsi lembaga kontrol, sehingga akan tercipta komunikasi politik yang semakin kondusif yang pada akhirnya akan mewujudkan Provinsi NTB yang aman, damai dan harmonis di segala bidang pembangunan. Dalam pembangunan politik lokal, tantangan yang dihadapi adalah mempertahankan momentum pelebagaan demokratisasi; menyepakati pentingnya melaksanakan etika politik yang santun dan lebih demokratis; menyepakati kembali makna penting persatuan; menyelesaikan masalah-masalah politik sensitif yang tersisa; terus melaksanakan reformasi birokrasi; menjadikan pendidikan politik sebagai alat transformasi sosial menuju demokrasi; serta melembagakan kebebasan pers/media massa yang lebih mendidik untuk kemajuan bersama masyarakat NTB.

Pembangunan perumahan adalah memenuhi kebutuhan hunian bagi masyarakat dan mewujudkan permukiman yang sehat dan tidak kumuh melalui reformasi pertanahan dan penataan ruang, penguatan swadaya masyarakat dalam pembangunan rumah melalui fasilitas kredit perumahan, fasilitas pemberdayaan masyarakat, dan bantuan teknis kepada kelompok masyarakat berswadaya dalam pembangunan rumah.

Pembangunan prasarana dan sarana transportasi akan terus ditingkatkan dengan menyediakan infrastruktur transportasi untuk pelayanan distribusi komoditi perdagangan dan industri serta pergerakan barang dan orang dalam lingkup daerah dan nasional.

Pembangunan telematika akan ditingkatkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat untuk mendapatkan akses telekomunikasi. Disamping itu, secara bertahap akan ditingkatkan penyebaran dan pemanfaatan arus informasi dan teledensitas pelayanan telematika masyarakat pengguna jasa.

Penyediaan listrik bagi masyarakat dan industri akan terus ditingkatkan, demikian juga sarana dan prasarana irigasi dalam mendukung pembangunan pertanian secara luas. Dengan tersedianya infrastruktur tersebut daya saing daerah akan meningkat.

BAB III

VISI DAN MISI PEMBANGUNAN DAERAH

3.1. VISI

Berdasarkan kondisi dan analisis terhadap kondisi saat ini, modal pembangunan yang dimiliki, dan tantangan dalam 20 tahun ke depan serta mengacu pada visi RPJP Nasional 2005-2025, maka visi Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat Tahun 2005 – 2025 adalah:

TERWUJUDNYA MASYARAKAT NUSA TENGGARA BARAT YANG BERIMAN, MAJU DAN SEJAHTERA

Visi Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat Tahun 2005 – 2025 ini mengarah pada pencapaian tujuan nasional, yaitu “masyarakat adil dan makmur” seperti tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 dan tujuan otonomi daerah, yaitu “terwujudnya kesejahteraan masyarakat” seperti tertuang dalam UU Nomor 32 Tahun 2004. Disamping “kemandirian dan kemajuan” sebagai prasyarat dalam memacu ketertinggalan daerah.

BERIMAN adalah situasi dan kondisi spiritual masyarakat dalam penghayatan dan pengamalan ajaran agama yang terwujud dalam masyarakat silaturahmi yang memiliki sikap menjunjung tinggi kerukunan hidup antar internal umat satu agama dan antara umat agama yang satu dengan umat agama lainnya, saling menghargai, saling memaafkan, tolong menolong, peduli serta jujur. Beriman juga dimaksudkan bagi pencapaian rasa syukur untuk memperoleh limpahan rahmat dan kasih sayang dari Tuhan Yang Maha Esa sehingga masyarakat berhasil melaksanakan pembangunan yang tumbuh dan berkembang dinamis.

MAJU adalah gambaran kondisi dan situasi masyarakat Nusa Tenggara Barat yang berkehendak dan mampu menerapkan IPTEK dalam mengelola sumber daya alam dan lingkungan hidup guna bergerak menuju suatu kehidupan yang lebih baik. Di dalamnya juga terkandung makna **MANDIRI** yaitu kemampuan dan kapasitas yang dimiliki untuk mampu melaksanakan pembangunan secara sinergis pada semua aspek kehidupan bangsa. Daerah yang maju adalah daerah yang masyarakatnya terjamin hak-haknya, terjamin rasa keamanan dan ketentraman dalam hidupnya. Selain itu, daerah yang maju adalah daerah yang infrastrukturnya juga maju, berfungsinya secara baik dan benar kelembagaan politik, kelembagaan hukum, dan lembaga kemasyarakatan disertai meningkatnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan. Daerah yang mandiri adalah daerah yang mampu mengembangkan keunggulan daerahnya, tidak tergantung pada daerah lain atau pemerintah pusat, mampu mengatasi kerawanan, memiliki daya tahan yang tinggi terhadap perkembangan dan gejolak dari luar. Kemandirian adalah masalah sikap dan masalah budaya yang harus dicerminkan dalam aspek kehidupan ekonomi, politik, dan sosial budaya.

SEJAHTERA mengandung makna bahwa masyarakat mampu memenuhi kebutuhan dasarnya yaitu pangan, sandang, papan, pendidikan, kesehatan, kesempatan bekerja, rekreasi, ibadah, pelayanan publik serta hubungan sosial secara wajar dalam suasana kelestarian lingkungan hidup. Terkandung juga makna di dalamnya adalah **KEADILAN** di mana segenap komponen masyarakat mempunyai kesempatan yang sama dalam meningkatkan taraf hidupnya, mendapatkan pekerjaan yang layak, mendapatkan pelayanan pendidikan,

pelayanan kesehatan, dan pelayanan sosial. Disamping itu, keadilan tercermin dari adanya kesempatan yang sama dari semua kelompok masyarakat dalam mengemukakan pendapat dan melaksanakan hak politiknya, adanya perlindungan dan kesamaan di depan hukum, di dalamnya tidak ada kesenjangan dan tidak ada diskriminasi dalam bentuk apapun baik antar individu, antar gender, dan antar kelompok masyarakat.

3.2. MISI

Dalam mewujudkan visi Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat Tahun 2005 – 2025 tersebut ditempuh melalui 5 (lima) misi pembangunan daerah, yaitu:

1. **Mewujudkan masyarakat beriman, bermoral, berbudaya, dan berkesadaran hukum**, yaitu terwujudnya masyarakat yang tangguh menjunjung tinggi nilai-nilai agama, budaya dan hukum dalam keseharian hidup dan kehidupannya serta bertanggungjawab secara arif bijaksana dan taat azas.
2. **Mewujudkan masyarakat sejahtera**, yaitu pemenuhan hajat hidup masyarakat mencakup kebutuhan sandang, pangan dan papan, pendidikan, kesehatan dan lapangan kerja, keamanan dan keselamatan diri dan lingkungannya, serta pemenuhan aktualisasi ekstensi diri dan kepribadian.
3. **Mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan**, yaitu terwujudnya peningkatan hasil dan manfaat pembangunan yang ditujukan bagi kesejahteraan seluruh masyarakat dalam tatanan hubungan kemitraan pemerintah dan masyarakat yang berkeadilan, dalam kerangka supremasi hukum, penghormatan dan penegakan hak-hak azasi manusia.
4. **Mewujudkan kemandirian dan daya saing daerah**, yaitu terwujudnya kemampuan dinamis mengembangkan diri dan profesionalisme masyarakat membangun kesejahteraan fisik dan mental dalam tatanan hubungan harmonis yang didukung kelestarian dan keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup serta berkembangnya kearifan lokal, sebagai daya mampu keunggulan relatif terhadap wilayah lain.
5. **Mewujudkan pembangunan berkelanjutan**, yaitu pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam, lingkungan hidup dan sumber daya buatan bagi keberhasilan pembangunan kesejahteraan generasi masa kini dengan memperhitungkan secara cermat dan bertanggungjawab bagi kelangsungan hidup dan kehidupan generasi mendatang.

BAB IV
ARAH DAN TAHAPAN PEMBANGUNAN
JANGKA PANJANG 2005 - 2025

Untuk mencapai visi pembangunan jangka panjang Nusa Tenggara Barat Tahun 2005-2025 yaitu mewujudkan masyarakat Nusa Tenggara Barat yang beriman, maju, dan sejahtera perlu ditentukan arah pembangunan yang hendak dituju. Sementara itu, untuk memberikan arah yang jelas bagi pelaksanaan pembangunan jangka panjang daerah, maka ditentukan terlebih dahulu sasaran pembangunan pada setiap misi yang telah dirumuskan.

A. Terwujudnya masyarakat beriman, bermoral, berbudaya, dan berkesadaran hukum yang ditunjukkan oleh:

1. Meningkatnya peranan lembaga pemerintahan sebagai regulator yang diikuti dengan semakin menurunnya peranan sebagai pelaku kegiatan di masyarakat.
2. Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis sesuai prinsip-prinsip tata kelola yang baik (good governance) dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
3. Terwujudnya karakter masyarakat yang tangguh, kompetitif, dan bermoral tinggi yang dicirikan dengan watak dan perilaku manusia yang beriman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi luhur, toleran, bergotong royong, patriotik, dinamis, dan berorientasi pada ilmu pengetahuan dan teknologi.
4. Terwujudnya perikehidupan masyarakat yang dinamis, berkeadilan, aman, tertib, dan harmonis.
5. Makin mantapnya peranan budaya dalam pembangunan daerah.

B. Terwujudnya masyarakat sejahtera, ditunjukkan oleh:

1. Tercapainya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkesinambungan sehingga pendapatan per kapita riil penduduk terus meningkat, tingkat pengangguran tidak lebih dari 5 persen dan angka kemiskinan dibawah 10 persen.
2. Terpenuhinya kebutuhan hunian dan lingkungan permukiman yang layak bagi seluruh masyarakat.
3. Meningkatnya kualitas pendidikan penduduk, yang dicirikan dengan terbebasnya penduduk Nusa Tenggara Barat dari buta huruf, keterampilan lulusan yang sesuai dengan permintaan pasar kerja, dan rata-rata lama sekolah penduduk menjadi 12 tahun.
4. Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat, yang dicirikan dengan terbebasnya penduduk Nusa Tenggara Barat dari penyakit dasar, menurunnya angka kematian bayi, meningkatnya usia harapan hidup, menurunnya angka kematian ibu melahirkan, dan menurunnya prevalensi gizi kurang pada anak balita. Seluruh indikator kesehatan sama/mendekati rata-rata nasional.

C. Terwujudnya pemerataan pembangunan yang berkeadilan, ditandai oleh:

1. Tingkat pembangunan yang semakin merata ke seluruh wilayah dan semua lapisan masyarakat. Terwujudnya peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah, termasuk berkurangnya kesenjangan antar wilayah di Nusa Tenggara Barat

2. Kemandirian pangan dapat dipertahankan pada tingkat aman dan dalam kualitas gizi yang memadai serta tersedianya instrumen jaminan pangan untuk tingkat rumah tangga.
3. Terpenuhinya kebutuhan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana pendukungnya bagi seluruh masyarakat.

D. Terwujudnya kemandirian dan daya saing daerah, ditandai oleh:

1. Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang makin meningkat, termasuk peran perempuan dalam pembangunan. Secara umum peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia Nusa Tenggara Barat ditandai dengan meningkatnya IPM serta tidak ada pertumbuhan penduduk karena kelahiran. Angka IPM Nusa Tenggara Barat harus sama/mendekati rata-rata nasional.
2. Terbangunnya struktur perekonomian yang variatif dan kokoh berdasarkan keunggulan komparatif dan kompetitif. Sektor pertanian dalam arti luas, industri pengolahan, pariwisata, dan jasa menjadi basis aktivitas ekonomi yang menghasilkan komoditi berkualitas dan berdaya saing.
3. Terbangunnya jaringan infrastruktur perhubungan yang terintegrasi yang dicirikan oleh terbukanya hubungan antar desa satu sama lain di dalam dan ke luar wilayah Nusa Tenggara Barat serta sentra-sentra produksi dengan pasar.
4. Terpenuhinya pasokan tenaga listrik di seluruh wilayah Nusa Tenggara Barat yang mampu mendukung dinamika ekonomi dan kehidupan masyarakat. Rasio elektrifikasi mencapai angka minimal 95 persen.
5. Meningkatnya penguasaan, pemanfaatan dan penciptaan ilmu pengetahuan dan teknologi.

E. Terwujudnya pembangunan berkelanjutan, ditunjukkan oleh:

1. Meningkatnya kualitas pengelolaan dan pendayagunaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup yang dicerminkan oleh tetap terjaganya fungsi daya dukung dan kemampuan pemulihannya dalam mendukung kualitas kehidupan sosial dan ekonomi secara serasi, seimbang dan lestari.
2. Terpeliharanya kekayaan keragaman jenis dan kekhasan sumber daya alam hayati untuk mewujudkan nilai tambah dan daya saing daerah.
3. Terkendalikannya pencemaran dan kerusakan lingkungan.
4. Meningkatnya kesadaran, sikap mental, dan perilaku masyarakat dalam pengelolaan Sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup untuk menjaga kenyamanan dan kualitas kehidupan.
5. Pengembangan wilayah dalam kerangka membangun geo park, Lombok as Ecoisland (leci) dan Sumbawa as Ecozone (suez).

4.1. ARAH PEMBANGUNAN

Untuk mencapai tingkat kesejahteraan, keadilan, kemandirian dan kemajuan yang diinginkan maka ditetapkan arah pembangunan jangka panjang Daerah Nusa Tenggara Barat yang merupakan penjabaran mengenai arah atau tujuan yang hendak dituju dalam upaya mewujudkan sasaran pokok pembangunan. Arah pembangunan pada setiap misi dalam pembangunan jangka panjang daerah Nusa Tenggara Barat adalah sebagai berikut:

- 1. Arah kebijakan misi Mewujudkan Masyarakat Beriman, Bermoral, Berbudaya dan Berkesadaran Hukum** meliputi:

a. Mewujudkan Masyarakat yang Tangguh, Kompetitif dan Bermoral Tinggi Berdasarkan Nilai-Nilai Agama dan Nilai Budaya.

Agenda terhadap arah kebijakan tersebut meliputi:

- Pemantapan fungsi dan peranan agama sebagai landasan moral dan etika dalam pembangunan, membina ahlak mulia, memupuk etos kerja, menghargai prestasi, dan menjadi kekuatan pendorong dalam mencapai kemajuan dan pembangunan.
- Peningkatkan fungsi dan peran tokoh-tokoh agama dalam meningkatkan kerukunan hidup umat beragama dengan meningkatkan rasa saling percaya dan harmonisasi antar kelompok agama dan kelompok masyarakat.
- Penguatan kapasitas lembaga sosial keagamaan dan lembaga budaya dalam peningkatan pembinaan kehidupan masyarakat yang penuh toleransi, tenggang rasa dan harmonis.
- Penguatan fungsi dan peran tokoh agama dalam meningkatkan kerukunan hidup umat beragama dan kehidupan sosial kemasyarakatan. Adapun prioritas lokasi meliputi wilayah perkotaan, pedesaan, dan kawasan rentan konflik.

b. Mewujudkan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat melalui peningkatan kesadaran hukum dan penegakan hak asasi manusia (HAM).

Agenda terhadap arah kebijakan tersebut meliputi:

- Peningkatan peran serta masyarakat dalam rangka mewujudkan terjaminnya keamanan dan ketertiban masyarakat.
- Peningkatan, pemantapan, dan penguatan kesadaran dan penghayatan masyarakat terhadap hukum dan HAM.
- Pemantapan dan penguatan peran lembaga sosial masyarakat dalam turut bertanggung jawab dan berperan aktif menciptakan keamanan dan ketertiban dalam bentuk kerjasama dan kemitraan dengan polisi.
- Peningkatan kualitas kelembagaan dan profesionalisme pamswakarsa.

c. Memantapkan Peranan Budaya dalam Pembangunan Daerah.

Agenda terhadap arah kebijakan tersebut meliputi:

- Penataan pembangunan budaya daerah dan sistem sosial yang berakar dan unik, seperti religius, kebersamaan, dan persatuan.
- Revitalisasi dan reaktualisasi tata nilai budaya daerah yang unggul.
- Pengembangan bentuk-bentuk pengungkapan kreativitas melalui kesenian dalam kerangka peningkatan harkat, martabat dan peradaban manusia.
- Pengembangan budaya iptek melalui pengembangan budaya membaca dan menulis, masyarakat pembelajar, masyarakat yang cerdas, kritis, dan kreatif dalam rangka pengembangan tradisi iptek dan budaya produktif.

d. Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat.

Agenda terhadap arah kebijakan tersebut meliputi:

- Peningkatkan fasilitasi akses masyarakat terhadap segala informasi yang dibutuhkan dan pelibatan masyarakat dalam berbagai proses pengambilan keputusan pembangunan daerah.
- Peningkatan kesadaran dan penghayatan masyarakat terhadap hak-haknya sebagai warga negara serta bentuk-bentuk perilaku merasa memiliki “daerahnya” dan taat hukum.
- Peningkatan pelayanan dan bantuan hukum kepada masyarakat dengan biaya yang terjangkau, proses yang tidak berbelit dan penetapan putusan yang mencerminkan rasa keadilan masyarakat.

Adapun prioritas lokasi meliputi wilayah perkotaan dan pedesaan.

Indikator keberhasilan dari misi mewujudkan masyarakat beriman, bermoral, berbudaya dan berkesadaran hukum adalah menurunnya konflik antar kelompok masyarakat dan antar umat beragama, menurunnya angka indeks kriminalitas, meningkatnya indeks kesetaraan gender; menurunnya angka korban kekerasan dalam rumah tangga dan trafficking, meningkatnya aktivitas berkesenian dan apresiasi budaya masyarakat, meningkatnya minat baca masyarakat, dan meningkatnya rasio jumlah perpustakaan dengan penduduk.

2. Arah kebijakan misi Mewujudkan Masyarakat Sejahtera, meliputi:

a. Menjamin Ketersediaan Pangan dan Gizi Masyarakat.

Agenda terhadap arah kebijakan tersebut adalah:

- Pengembangan kelembagaan ketahanan pangan di daerah yang mampu menjamin pemenuhan kebutuhan pangan di tingkat rumah tangga yang cukup, baik jumlah maupun mutu gizinya, aman, dan terjangkau.
- Mengembangkan sumber-sumber pangan yang beragam sesuai dengan keragaman lokal.
- Pemantapan ketahanan dan kemandirian pangan daerah dengan mengembangkan kemampuan produksi di daerah serta pemenuhan konsumsi seimbang.
- Optimalisasi peran kelembagaan ketahanan pangan di daerah yang mampu menjamin pemenuhan kebutuhan pangan dan gizi.

b. Menyediakan Kebutuhan Hunian dan Lingkungan Permukiman yang Layak.

Agenda terhadap arah kebijakan tersebut adalah:

- Penelitian dan pengembangan potensi pembiayaan perumahan yang berasal dari masyarakat dan lembaga keuangan formal dan non-formal.
- Peningkatan dan optimalisasi kualitas permukiman rakyat.
- Fasilitasi pembangunan perumahan yang berkelanjutan, memadai, layak dan terjangkau oleh daya beli masyarakat.
- Pemanfaatan dan pengembangan potensi pembiayaan perumahan yang berasal dari lembaga keuangan formal dan non-formal.
- Optimalisasi pemanfaatan potensi pembiayaan perumahan yang berasal dari masyarakat.

c. Menyediakan Lapangan Kerja.

Agenda terhadap arah kebijakan tersebut adalah:

- Penelitian dan pengembangan potensi angkatan kerja dan peluang lapangan kerja formal

- Peningkatkan produktivitas dan penempatan tenaga kerja agar dapat bersaing dan menghasilkan nilai tambah yang tinggi
- Peningkatkan pelayanan kesejahteraan pekerja di sektor informal
- Peningkatan hubungan industrial yang harmonis dengan perlindungan yang layak, keselamatan kerja yang memadai, serta penyelesaian perselisihan yang memuaskan semua pihak.

Adapun prioritas lokasi meliputi daerah perkotaan, kawasan strategis industri dan kawasan agropolitan.

d. Meningkatkan Kualitas Penduduk.

Agenda terhadap arah kebijakan tersebut adalah:

- Penelitian dan pengembangan database jumlah dan laju pertumbuhan penduduk.
- Penataan sistem administrasi kependudukan untuk mendukung perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.
- Pengendalian jumlah dan laju pertumbuhan penduduk menuju terbentuknya keluarga kecil berkualitas
- Penataan persebaran penduduk yang lebih seimbang sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan.

e. Meningkatkan Pelayanan Dasar Pendidikan.

Agenda terhadap arah kebijakan tersebut adalah:

- Penelitian dan pengembangan database pelayanan pendidikan di semua jenjang.
- Peningkatan akses dan mutu pelayanan pendidikan bagi semua lapisan masyarakat dan semua jenjang pendidikan.
- Fasilitasi peningkatan pengetahuan dan keterampilan bagi penduduk usia produktif.
- Pembebasan biaya pendidikan pada jenjang pendidikan dasar.
- Keberlanjutan peningkatan akses dan mutu pelayanan pendidikan untuk meningkatkan harkat dan kualitas hidup dan produktivitas penduduk, serta menumbuhkan kebanggaan kebangsaan dan akhlak mulia.

f. Meningkatkan Pelayanan Masyarakat.

Agenda terhadap arah kebijakan tersebut adalah:

- Peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau pada setiap strata pelayanan pada berbagai tingkat wilayah.
- Peningkatan promosi, pengobatan, rehabilitasi dan prevensi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat.
- Penambahan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan masyarakat.
- Peningkatan dan penguatan sistem pelayanan kesehatan.
- Peningkatan jumlah tenaga kesehatan dan pemberdayaan profesi kesehatan.

g. Meningkatkan Kesejahteraan Sosial.

Agenda terhadap arah kebijakan tersebut adalah:

- Penyediaan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang memadai.
- Peningkatan kualitas kesejahteraan dan produktivitas penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)
- Peningkatan sistem pembiayaan sosial ekonomi masyarakat miskin/terlantar dan jaminan sosial daerah (Jamsosda) bagi PMKS.
- Peningkatan jangkauan pelayanan dan rehabilitasi sosial yang berkualitas termasuk pemberdayaan sosial yang tepat guna bagi masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
- Pengembangan dan penataan sistem perlindungan dan jaminan sosial untuk memastikan dan memantapkan pemenuhan hak-hak masyarakat akan pelayanan sosial dasar.
- Penanganan dampak sosial ekonomi masyarakat pasca bencana alam. Adapun prioritas lokasi meliputi wilayah perkotaan dan pedesaan.

Indikator keberhasilan dari misi mewujudkan masyarakat sejahtera adalah tercukupinya kebutuhan pangan rakyat; menurunnya angka gizi buruk dan gizi kurang; menurunnya angka kemiskinan hingga sama dengan rata-rata nasional; meningkatnya angka persentase kepemilikan rumah; menurunnya angka pengangguran hingga mencapai angka di bawah 5%; menurunnya angka pertumbuhan penduduk mendekati 0%; meningkatnya akses dan mutu pendidikan yang ditandai dengan meningkatnya angka angka partisipasi sekolah, meningkatnya lama sekolah menjadi 12 tahun, dan angka melek huruf diatas 95%; meningkatnya derajat kesehatan masyarakat yang ditandai dengan meningkatnya usia harapan hidup, menurunnya angka kematian ibu melahirkan dan angka kematian bayi, dan menurunnya prevelensi kurang gizi; menurunnya jumlah PMKS; dan meningkatnya fasilitas dan mutu pelayanan sosial masyarakat.

3. **Arah Kebijakan misi Mewujudkan Pemerataan Pembangunan dan Berkeadilan**, meliputi:

- a. Meningkatkan Pemerataan Pembangunan.

Agenda terhadap arah pembangunan tersebut adalah:

- Pembangunan dan pertumbuhan wilayah-wilayah strategis sehingga dapat mengembangkan wilayah-wilayah tertinggal di sekitarnya.
- Pengembangan wilayah tertinggal dan terpencil melalui pemberdayaan masyarakat secara langsung, dan jaminan akses terhadap pelayanan publik.
- Pemanfaatan rencana tata ruang sebagai landasan atau acuan kebijakan spasial bagi pembangunan lintas sektor maupun wilayah agar pemanfaatan ruang dapat sinergis, serasi, dan berkelanjutan.
- Fasilitasi pembangunan perdesaan melalui pengembangan agropolitan, peningkatan kapasitas SDM, pengembangan jaringan infrastruktur penunjang, peningkatan akses informasi dan pemasaran, lembaga keuangan, kesempatan kerja dan teknologi, dan pengembangan social capital dan human capital.
- Percepatan pembangunan kota-kota kecil dan menengah untuk dapat menjalankan peran sebagai motor penggerak pembangunan wilayah-wilayah sekitarnya maupun dalam melayani kebutuhan warga kota.
- Peningkatan konektivitas dan keterkaitan kegiatan ekonomi di wilayah perkotaan dengan wilayah perdesaan.
- Pengelolaan pertanahan secara efisien, efektif, serta melaksanakan penegakan hukum terhadap hak atas tanah dengan menerapkan prinsip-prinsip keadilan, transparansi, dan demokrasi.

Adapun prioritas lokasi meliputi wilayah strategis, desa tertinggal dan terpencil, kawasan agropolitan, perkotaan dan industri.

b. Mengurangi kemiskinan dalam masyarakat.

Agenda terhadap arah pembangunan tersebut adalah:

- Penelitian dan pengembangan data base dan strategi mainstreaming penanggulangan kemiskinan daerah.
- Perlindungan, pemberdayaan dan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat miskin secara bertahap dengan mengutamakan prinsip kesetaraan khususnya pada layanan akses dan mutu pendidikan, kesehatan dan ekonomi.
- Peningkatan pemahaman tentang pentingnya perwujudan hak-hak dasar masyarakat miskin.

Adapun prioritas lokasi meliputi wilayah pedesaan tertinggal dan terpencil, daerah perkotaan dan perbatasan.

c. Mewujudkan Supremasi Hukum dan Penegakan Hak Asasi Manusia.

Agenda terhadap arah pembangunan tersebut adalah:

- Mengidentifikasi permasalahan yang berkaitan dengan ekonomi, terutama dunia usaha dan dunia industri, serta terciptanya kepastian investasi, terutama penegakan dan perlindungan hukumnya.
- Penataan produk hukum sesuai hirarki perundang-undangan dan kearifan lokal.
- Penguatan kelembagaan dan profesionalisme aparat hukum.
- Penegakan supremasi hukum dan HAM, pembangunan budaya hukum, harmonisasi produk hukum, pengembangan jaringan advokasi hukum pada masyarakat, dan perluasan akses masyarakat terhadap keadilan.
- Meningkatkan kepastian dan perlindungan hukum, penegakan hukum dan HAM, kesadaran hukum, serta pelayanan hukum.
- Penghargaan bagi masyarakat sipil untuk berkontribusi dalam pengelolaan pemerintahan.

Adapun prioritas lokasi meliputi daerah dengan tingkat kemiskinan dan kriminalitas tinggi.

d. Penyelenggaraan pemerintahan diarahkan untuk mewujudkan penyelenggaraan otonomi daerah yang mampu mensejahterakan rakyat dan pemantapan tata kelola yang baik (*good governance*).

Agenda terhadap arah pembangunan tersebut adalah:

- Pembentukan kemandirian dan kedewasaan masyarakat, dan membentuk kelas menengah yang kuat di bidang ekonomi dan pendidikan.
- Penataan kelembagaan pemerintah daerah dan pengembangan diklat aparatur.
- Penyusunan dan penerapan standar pelayanan minimal
- Peningkatan kinerja birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan masyarakat.
- Penataan fungsi-fungsi positif dari pranata-pranata kemasyarakatan, lembaga hukum dan lembaga politik untuk membangun kemandirian masyarakat dalam mengelola berbagai potensi konflik sosial yang merusak.
- Fasilitasi penguatan pemerintah desa/kelurahan.

- Peningkatan kualitas kebijakan publik dan perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif.
- Pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan (e-gov; e-procurement; e-bisnis).
- Peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pengawasan aparatur pemerintah.

Adapun prioritas lokasi meliputi lingkungan pemerintahan provinsi, kabupaten dan kota.

e. Mengembangkan Kapasitas Pemerintah Daerah.

Agenda terhadap arah pembangunan tersebut adalah:

- Peningkatan kapasitas kelembagaan, kapasitas keuangan termasuk upaya peningkatan kemitraan dengan masyarakat dan swasta dalam pembiayaan pembangunan daerah.
- Penguatan kapasitas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
- Pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan pengetahuan dan keterampilan, peningkatan akses pada modal usaha dan SDA; pemberian kesempatan yang luas untuk menyampaikan aspirasinya, dan peningkatan kesempatan dan kemampuan untuk mengelola usaha ekonomi produktif.
- Peningkatan kapasitas daerah dalam perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja.
- Peningkatan kapasitas kelembagaan, perencanaan dan penganggaran, manajemen keuangan pemerintah dan anggota DPRD.
Adapun prioritas lokasi meliputi DPRD provinsi, kabupaten/kota, pemerintah provinsi, kabupaten/kota.

f. Meningkatkan Kerjasama Antardaerah

Agenda terhadap arah pembangunan tersebut adalah:

- Meningkatkan koordinasi dan kerjasama antar pemerintah daerah.
- Menghindari timbulnya inefisiensi dalam pelayanan publik.
- Pengkajian potensi dan peluang kerjasama antar daerah.
- Pemanfaatan keunggulan komparatif maupun kompetitif masing-masing daerah.
- Pengembangan kerjasama antar daerah berdasarkan keunggulan komparatif dan kompetitif.
Adapun prioritas lokasi meliputi kabupaten/kota yang memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif.

g. Mewujudkan Aparatur Pemerintah yang Baik dan Profesional.

Agenda terhadap arah pembangunan tersebut adalah:

- Fasilitasi penanggulangan penyalahgunaan kewenangan aparatur pemerintah daerah dengan penerapan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik.
- Peningkatan intensitas dan efektivitas pengawasan aparatur pemerintahan melalui pengawasan internal, pengawasan fungsional, dan pengawasan masyarakat.
- Pemberian sanksi yang seberat-beratnya kepada pelaku penyalahgunaan kewenangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- Peningkatan etika birokrasi dan budaya kerja serta kompetensi para penyelenggara pemerintahan dalam menerapkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik dalam rangka peningkatan akses dan mutu pelayanan publik.

Adapun prioritas lokasi meliputi pemerintah provinsi, kabupaten/kota.

h. Meningkatkan Peranan Komunikasi dan Informasi.

Agenda terhadap arah pembangunan tersebut adalah:

- Mewujudkan pemerataan akses informasi yang lebih besar dengan mendorong munculnya media-media massa daerah yang independen.
- Pengembangan jaringan informasi yang lebih bersifat interaktif antara masyarakat dan kalangan pengambil keputusan politik untuk menciptakan kebijakan yang lebih mudah dipahami masyarakat luas;
- Fasilitasi pengembangan kebebasan pers yang lebih mapan dan terlembaga serta menjamin hak masyarakat untuk berpendapat dan mengontrol jalannya penyelenggaraan pemerintahan secara cerdas dan demokratis.

Adapun prioritas lokasi meliputi Pemerintah provinsi, kabupaten/kota.

i. Mengembangkan Proses dan Budaya Politik.

Agenda terhadap arah pembangunan tersebut adalah:

- Membangun kesadaran budaya dan penanaman nilai-nilai politik demokratis terutama penghormatan nilai-nilai HAM, nilai-nilai persamaan, anti kekerasan, serta nilai-nilai toleransi melalui berbagai wacana dan media.
- Peningkatan kualitas proses dan mekanisme seleksi publik yang lebih terbuka bagi para pejabat politik dan pejabat publik.
- Fasilitasi dialog bagi peningkatan kesadaran mengenai pentingnya memelihara persatuan dan kesatuan.
- Pengembangan komitmen politik yang tegas terhadap pentingnya kebebasan media massa, keleluasaan berserikat, berkumpul, dan menyatakan pendapat setiap warga negara berdasarkan aspirasi politiknya masing-masing.
- Mengembangkan wacana dialog dengan semua stakeholders dalam proses prumusan kebijakan.

Adapun prioritas lokasi meliputi pemerintah provinsi, kabupaten/kota, pemerintah, pihak swasta, dan kalangan lembaga swadaya masyarakat.

Indikator keberhasilan dari misi mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan adalah yaitu tercapainya pertumbuhan dan pemerataan ekonomi yang berkualitas, meningkatnya konektivitas antar wilayah, menurunnya angka kemiskinan dan pengangguran, meningkatnya kesejahteraan masyarakat yang tercermin dari meningkatnya PDRB per kapita dan indeks nilai tukar petani/nelayan (NTP/NTN), terselenggaranya tata pemerintahan yang baik melalui penerapan prinsip-prinsip tata kelola yang baik (*good governance*), meningkatnya partisipasi politik masyarakat, menurunnya indeks kriminalitas, dan meningkatnya pendapatan asli daerah.

4. **Arah pembangunan misi Mewujudkan Kemandirian dan Daya Saing Daerah,** meliputi:

a. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia.

Agenda terhadap arah pembangunan tersebut adalah:

- Perluasan dan pemerataan akses pendidikan pada semua jenjang pendidikan baik formal, non formal dan informal.

- Peningkatan mutu, kuantitas, dan relevansi pendidikan kejuruan pada semua jenjang pendidikan dengan menyertakan muatan kurikulum agribisnis, pariwisata, dan keunggulan lokal.
- Peningkatan kualitas Sekolah Kejuruan berbasis keunggulan lokal dan teknologi dengan mengedepankan link and match .
- Peningkatan kualitas pendidikan tinggi.
- Pengembangan budaya baca.
- Peningkatkan kualitas dan peran pemuda dalam berbagai bidang pembangunan.
- Peningkatkan budaya olah raga dan prestasi olah raga di kalangan masyarakat.
- Penguatan kelembagaan dan jaringan pengarusutamaan gender.
- Pencapaian penduduk tumbuh seimbang yang ditandai dengan angka reproduksi netto (NRR) sama dengan 1, atau angka fertilitas total (TFR) sama dengan 2,1.
- Memperbaiki Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Adapun prioritas lokasi meliputi Pemerintah provinsi, kabupaten/kota, pemerintah desa, pihak swasta, dan kalangan lembaga swadaya masyarakat.

b. Meningkatkan Perekonomian Daerah.

Agenda terhadap arah pembangunan tersebut adalah:

- Penguatan basis keunggulan komparatif daerah menjadi keunggulan kompetitif yang berdaya saing tinggi untuk mendukung iklim usaha yang kondusif.
- Peningkatan kesempatan berusaha dan penciptaan wirausaha baru dan pembinaan usaha sektor primer, sekunder dan tersier.
- Pengembangan keterkaitan sistem produksi, distribusi, dan pelayanan antar pusat-pusat pengembangan ekonomi.
- Pengembangan prinsip demokrasi ekonomi yang menjamin kesempatan berusaha dan bekerja bagi seluruh masyarakat dan mendorong tercapainya penanggulangan kemiskinan.
- Pengembangan kelembagaan ekonomi dengan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.
- Peningkatan kualitas pertumbuhan sektor pertanian.
- Pelayanan investasi dan pengembangan investasi di daerah, baik PMDN dan PMA untuk mendukung terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang tinggi secara berkelanjutan dan berkualitas.
- Pengembangan iklim persaingan usaha yang sehat dan perlindungan konsumen.
- Pengembangan Usaha Kecil Menengah (UKM) untuk memberikan kontribusi pada pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan daya saing.
- Penguatan struktur perekonomian daerah agar terwujud ketahanan ekonomi yang tangguh dan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dengan basis agroindustri dan pariwisata.
- Penjaminan ketersediaan bahan pokok dan barang strategis lainnya di daerah dalam harga yang terjangkau.
- Pengembangan kepariwisataan agar mampu meningkatkan citra daerah, meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal, dan perluasan kesempatan kerja.

- Peningkatan pengelolaan keuangan negara melalui pengelolaan APBD yang bertumpu pada sistem penganggaran yang transparan, akuntabel dan dapat menjamin efektivitas pemanfaatan.
 - Peningkatan efektivitas penerimaan asli daerah.
 - Peningkatan efisiensi, modernisasi dan nilai tambah sektor pertanian dalam arti luas (tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, dan peternakan), kelautan dan perikanan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan dan dalam kaitannya dengan pengentasan kemiskinan, keterbelakangan, dan ketahanan pangan.
 - Pembinaan industri yang berdaya saing dengan basis keunggulan komparatif.
 - Percepatan berkembangnya industri jasa, termasuk jasa infrastruktur dan keuangan.
 - Meningkatkan kuantitas dan kualitas komoditi ekspor daerah.
- Adapun prioritas lokasi meliputi kawasan strategis, industri, kawasan ekonomi khusus, pemerintah provinsi, kabupaten/kota, pihak swasta.

c. Meningkatkan Penguasaan, Pemanfaatan dan Penciptaan Iptek.

Agenda terhadap arah pembangunan tersebut adalah:

- Mendukung ketahanan pangan, ketersediaan energi, penciptaan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
 - Peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka pengembangan sumber daya
 - Pengembangan kapasitas SDM iptek.
 - Peningkatan sumber daya anggaran riset, dan sarana dan prasarana iptek.
- Adapun prioritas lokasi meliputi kawasan strategis perkotaan, kawasan agribisnis pedesaan, kawasan ekonomi khusus.

d. Membangun Jaringan Infrastruktur wilayah yang Handal dan Terintegrasi

Agenda terhadap arah pembangunan tersebut adalah:

- Pembangunan infrastruktur wilayah dalam rangka mendukung pengembangan perekonomian daerah dan konektivitas antar wilayah.
 - Fasilitasi kegiatan transaksi perdagangan sebagai sumber pergerakan orang, barang dan jasa yang menjadi pangsa pasar bisnis transportasi melalui political trading yang saling menguntungkan.
 - Fasilitasi pengembangan jaringan pelayanan secara inter dan antarmoda angkutan melalui pembangunan prasarana dan sarana transportasi.
 - Fasilitasi stakeholders untuk berpartisipasi dalam penyediaan pelayanan mulai dari tahap perencanaan, pembangunan, dan pengoperasiannya.
 - Meningkatkan keberpihakan terhadap pelayanan kepada masyarakat.
 - pengembangan infrastruktur perhubungan untuk kegiatan transaksi perdagangan, dan pengembangan jaringan pelayanan inter dan antarmoda angkutan sehingga tidak ada lagi bentuk monopoli transportasi
- Adapun prioritas lokasi meliputi kawasan strategis, industri, kawasan ekonomi khusus, pemerintah provinsi, kabupaten/kota, pihak swasta.

e. Memenuhi Pasokan Tenaga listrik di Seluruh Wilayah Nusa Tenggara Barat.

Agenda terhadap arah pembangunan tersebut adalah:

- Pengembangan kemampuan pemenuhan kebutuhan tenaga listrik di daerah dan kehandalannya untuk memulihkan kemampuan pasokan sistem

ketenagalistrikan yang memadai melalui rehabilitasi dan repowering pembangkit yang ada serta pembangunan pembangkit baru (geothermal)

- Fasilitasi peluang yang lebih luas bagi investasi swasta secara lebih terbuka, kompetitif, profesional, dan terarah, bagi badan usaha milik negara, dan pemerintah daerah.
- Fasilitasi pemenuhan kebutuhan tenaga listrik dan optimalisasi peluang investasi bagi BUMN, pemerintah daerah dan swasta secara transparan, profesional.

Adapun prioritas lokasi meliputi provinsi, kabupaten, dan kota.

Indikator keberhasilan misi mewujudkan kemandirian dan daya saing daerah adalah meningkatnya kualitas SDM dilihat dari beberapa indikator pendidikan dan kesehatan, meningkatnya prestasi atlet olahraga di berbagai pertandingan dan perlombaan olahraga di tingkat nasional dan internasional, meningkatnya jumlah koperasi bermutu, meningkatnya jumlah wirausaha baru, meningkatnya kontribusi sektor sekunder dan tersier dalam pembentukan produk domestik regional bruto (PDRB), peningkatan pertumbuhan dan nilai tambah sektor pertanian, tercapainya kedaulatan pangan di daerah, meningkatnya proporsi anggaran terhadap APBD untuk mendukung penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, meningkatnya kemandirian jalan, meningkatnya rasio elektrifikasi, meningkatnya jumlah desa yang teraliri listrik, dan berkurangnya ketimpangan antar daerah dan wilayah.

5. **Arah Pembangunan misi Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan**, meliputi:

a. Meningkatkan Kualitas Pengelolaan dan Pendayagunaan Sumber Daya Alam (SDA) yang Terbarukan, seperti Hutan, Pertanian, Perikanan dan Perairan.

Agenda terhadap arah pembangunan tersebut adalah:

- Pengelolaan secara rasional, optimal, efisien dan bertanggung jawab terutama SDA terbarukan yang masih dalam kondisi baik.
- Pemulihan daya dukung terhadap SDA terbarukan yang sudah dalam kondisi kritis untuk pencadangan bagi kepentingan generasi sekarang dan generasi mendatang.
- Penguatan kapasitas unit atau balai konservasi yang bertanggung jawab pada konservasi SDA.
- Pemanfaatan SDA terbarukan secara berkelanjutan dengan mengantisipasi dampak perubahan iklim.
- Pemantapan kapasitas personal dan kelembagaan konservasi SDA daerah.
- Sosialisai terkait dengan pengelolaan SDA yg terbarukan dan terbarukan diikuti dgn penegakan hukum dalam sengketa lahan.

Adapun prioritas lokasi meliputi kawasan sentra produksi pertanian, perikanan, kehutanan dan perairan.

b. Meningkatkan Kualitas Pengelolaan dan Pendayagunaan SDA yang Tidak Terbarukan, seperti Bahan Tambang, Mineral, dan Sumber Daya Energi Fosil.

Agenda terhadap arah pembangunan tersebut adalah:

- Pengkajian dan pengembangan kebutuhan reklamasi, dan konservasi pada areal pertambangan.
- Memperkuat pendanaan dan pencarian sumber-sumber energi alternatif atau bahan substitusi yang terbarukan, seperti biomassa, biogas, mikrohidro, energi matahari, panas bumi (geothermal), arus laut, dan tenaga angin yang lebih ramah lingkungan.

- Penguatan kapasitas unit atau balai konservasi yang bertanggung jawab pada konservasi SDA.
- Pemanfaatan SDA terbarukan secara berkelanjutan dengan mengantisipasi dampak perubahan iklim.
- Pemantapan kapasitas personal dan kelembagaan konservasi sumber daya alam daerah.
- Sosialisai terkait dengan pengelolaan SDA yg terbarukan dan terbarukan diikuti dgn penegakan hukum dalam sengketa lahan.

Adapun prioritas lokasi meliputi kawasan sentra produksi pertanian, perikanan, kehutanan dan kelautan.

c. Meningkatkan Kualitas Pengelolaan dan Pendayagunaan SDA yang Tidak Terbarukan, seperti Bahan Tambang, Mineral, dan Sumber Daya Energi.

Agenda terhadap arah pembangunan tersebut adalah:

- Pengkajian dan pengembangan kebutuhan reklamasi, dan konservasi pada areal pertambangan termasuk pertambangan rakyat.
- Memperkuat pendanaan dan pencarian sumber-sumber energi alternatif atau bahan substitusi yang terbarukan, seperti biomassa, biogas, mikrohidro, energi matahari, panas bumi (geothermal), arus laut, dan tenaga angin yang lebih ramah lingkungan.
- Pengembangan dan pemanfaatan nilai tambah SDA yang optimal, dan outputnya diarahkan untuk dijadikan sebagai kapital kumulatif. Hasil atau pendapatan yang diperoleh dari kelompok SDA ini diarahkan untuk percepatan pertumbuhan ekonomi dengan diinvestasikan kepada sektor-sektor lain yang produktif.

Adapun prioritas lokasi meliputi kawasan pertambangan di kabupaten, termasuk pertambangan liar.

d. Mengembangkan Potensi Sumber Daya Kelautan.

Agenda terhadap arah pembangunan tersebut adalah:

- Pengkajian potensi sumber daya kelautan, pesisir, dan pulau-pulau kecil beserta pemanfaatannya.
- Pengembangan pemanfaatan sumber daya kelautan melalui pendekatan multisektor, integratif, dan komprehensif agar dapat meminimalisasi konflik dan tetap menjaga kelestariannya.
- Peningkatan pengelolaan SDA kelautan secara terpadu antara sektor lautan dan daratan.

Adapun prioritas lokasi meliputi kawasan pesisir, kawasan laut dan pantai di kabupaten/kota.

e. Mewujudkan Konservasi Sumber Daya Air.

Agenda terhadap arah pembangunan tersebut adalah:

- Pengkajian potensi dan kebutuhan sumber daya air, dan kelembagaan sosial yang mengelolanya.
- Pelembagaan keberlanjutan daya dukung sumber daya air dengan menjaga kelestarian fungsi daerah tangkapan air dan keberadaan air tanah
- Pengembangan keseimbangan antara pasokan dan kebutuhan melalui pendekatan demand management yang ditujukan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan dan konsumsi air dan pendekatan supply management yang ditujukan untuk meningkatkan kapasitas dan keandalan pasokan air.

- Optimalisasi pemanfaatan sumber daya air dengan menerapkan konsep konservasi yang menjamin keberlanjutan daya dukung sumberdaya air yang ada
- Penguatan kelembagaan pengelola sumber daya air untuk meningkatkan keterpaduan dan kualitas pelayanan terhadap masyarakat.
- Perlindungan mata air dan air tanah.

Adapun prioritas lokasi meliputi kawasan konservasi hutan.

f. Memperhatikan dan Mengelola Keragaman Jenis dan Kekhasan SDA Hayati.

Agenda terhadap arah pembangunan tersebut adalah:

- Meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal, mengembangkan wilayah strategis dan cepat tumbuh.
- Memberdayakan institusi sosial dan ekonomi terkait dengan pengelolaan SDA di tingkat lokal.
- Melakukan kajian potensi keanekaragaman hayati.
- Pengembangan model hutan keanekaragaman hayati dgn mengembangkan dan memberdayakan institusi di tingkat lokal.

g. Mengendalikan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan.

Agenda terhadap arah pembangunan tersebut adalah:

- Memanfaatkan jasa lingkungan yang ramah lingkungan sehingga tidak mempercepat terjadinya degradasi dan pencemaran lingkungan.
- Memulihkan dan merehabilitasi kondisi lingkungan hidup diprioritaskan pada upaya untuk meningkatkan daya dukung lingkungan.
- Studi sumber sumber pencemaran utk mengidentifikasi dan dampak kerusakannya.
- Memulihkan dan merehabilitasi kondisi lingkungan hidup Dikawasan yg berpotensi mengalami pencemaran dan kerusakan lingkungan.
- Peningkatan kapasitas kelembagaan pengelolaan dan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan.

h. Meningkatkan Kapasitas Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup.

Agenda terhadap arah pembangunan tersebut adalah:

- Meningkatkan dukungan kelembagaan pengelola Sumberdaya alam dan lingkungan hidup dan perluasan penerapan etika lingkungan.
- Menegakan hukum lingkungan yang adil dan tegas.
- Meningkatkan dukungan sistem politik yang kredibel dalam mengendalikan konflik.

i. Meningkatkan Kesadaran Masyarakat untuk Mencintai Lingkungan Hidup

Agenda terhadap arah pembangunan tersebut adalah:

- Meningkatkan kesadaran generasi muda yang peduli terhadap isu Sumberdaya alam dan lingkungan hidup.
- Mempersiapkan penggerak bagi penerapan konsep pembangunan berkelanjutan dalam kehidupan sehari-hari.
- Meningkatkan kesadaran generasi muda utk mencintai lingkungan.
- Pengembangan dan penerapan kurikulum sekolah yg ramah (pro) terhadap lingkungan hidup.

Indikator keberhasilan dari misi mewujudkan pembangunan berkelanjutan adalah terpeliharanya kualitas, lingkungan hidup; terwujudnya pelestarian fungsi tangkapan air, pengelolaan danau/situ/embung; meningkatnya sumber daya alam hayati termanfaatkan dan diolah untuk agribisnis; meningkatnya jumlah desa yang teraliri listrik dengan sumber energi konvensional dan terbaharukan, menurunnya lahan kritis akibat eksploitasi sumberdaya alam, menurunnya insiden bencana alam, menurunnya tingkat pencemaran air dan udara dari berbagai sumber pencemaran seperti limbah dan gas buangan, dan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap kelestarian lingkungan dengan munculnya inisiasi pengelolaan sampah di tiap RT dan dusun.

4. 2. TAHAPAN DAN SKALA PRIORITAS.

Untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat maka pembangunan dilaksanakan secara bertahap dalam kerangka pembangunan jangka menengah. Setiap tahapan atau periode pembangunan ditetapkan agenda pembangunan sesuai dengan arah pembangunan yang telah ditentukan. Hal ini dimaksudkan agar terjadi kesinambungan pembangunan sehingga program dan kegiatan untuk mencapai indikator misi pembangunan tidak tumpang tindih. Oleh karena itu, agenda pembangunan dalam setiap periode bisa merupakan kelanjutan dari periode berikutnya dan/atau sesuai skala prioritas pada setiap periode tetapi merupakan agenda dari pencapaian misi pembangunan.

Tahapan pembangunan jangka menengah dapat dijelaskan sebagai berikut:

4.2.1. RPJM DAERAH ke - 1 (2005 - 2008)

Berlandaskan pelaksanaan dan pencapaian pembangunan tahap sebelumnya RPJM Daerah I diarahkan untuk menata kembali dan membangun NTB disegala bidang terutama dengan titik tekan pada penciptaan pondasi yang kokoh bagi pembangunan periode berikutnya. Oleh karena itu pembangunan pada periode/tahap ini diarahkan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan akses dan mutu pelayanan dasar, peningkatan ketersediaan infrastruktur dasar, peletakan dasar pembangunan budaya, dan peletakan dasar pembangunan berkelanjutan dan ramah lingkungan.

Pada pembangunan kehidupan beragama, kesadaran hukum, dan budaya ditekankan pada peningkatan fungsi dan peran tokoh-tokoh agama dalam meningkatkan kerukunan hidup umat beragama dengan meningkatkan rasa saling percaya dan harmonisasi antarkelompok agama dan kelompok masyarakat. Selain itu, peran masyarakat dalam rangka mewujudkan terjaminnya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, serta terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Peningkatan peran masyarakat dilakukan setelah didahului oleh upaya peningkatan kesadaran dan penghayatan masyarakat terhadap hukum dan hak azasi. Sementara itu, pembangunan budaya dilakukan dengan penataan pembangunan budaya daerah dan sistem sosial yang berakar dan unik, seperti religius, kebersamaan, dan persatuan.

Pembangunan di bidang kesejahteraan rakyat dilakukan dengan penekanan pada penyediaan pangan dan kesejahteraan pekerja. Selain itu, dilakukan pengembangan kelembagaan ketahanan pangan di daerah yang mampu menjamin pemenuhan kebutuhan pangan di tingkat rumah tangga yang cukup, baik jumlah maupun mutu gizinya, aman, dan terjangkau. Pengembangan sumber-sumber

pangan yang beragam sesuai dengan keragaman lokal juga dilakukan untuk mendukung diversifikasi pangan penduduk. Penyediaan kesempatan kerja dan peningkatan kualitas pekerja melalui peningkatan keterampilan dan produktivitas pekerja agar dapat bersaing dan menghasilkan nilai tambah yang tinggi. Dengan demikian, diharapkan angka pengangguran dan angka kemiskinan menurun secara signifikan.

Pembangunan pendidikan ditujukan pada penuntasan buta aksara, peningkatan rata-rata lama sekolah melalui penuntasan wajib belajar sembilan tahun. Pada tahap ini untuk wilayah perkotaan wajib belajar sembilan tahun dapat dimulai penuntasan wajib belajar sembilan tahun, sementara untuk wilayah pedesaan masih dalam tahap rintisan wajib belajar sembilan tahun. Dalam rangka penuntasan wajib belajar sembilan tahun dilakukan pengembangan pendidikan satu atap (sembilan tahun), peningkatan sarana dan prasarana pendidikan menengah. Penanganan pendidikan dilaksanakan sejak usia dini sampai dengan pendidikan tinggi melalui upaya peningkatan pemenuhan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, dan peningkatan kesejahteraan tenaga kependidikan secara bertahap. Perhatian secara proporsional untuk pelaksanaan pendidikan yang memadai termasuk pelaksanaan pendidikan di daerah pedesaan, daerah perbatasan antar provinsi dan daerah terpencil. Untuk pengembangan pendidikan menengah diupayakan melalui pengembangan sekolah kejuruan berbasis kompetensi dan keunggulan lokal terutama bagi daerah-daerah yang mempunyai keunggulan lokal pertanian, kelautan, industri dan pariwisata. Pembangunan sekolah kejuruan terus dilakukan agar proporsi jumlah sekolah kejuruan dan sekolah umum semakin dekat.

Pembangunan bidang kesehatan diarahkan pada upaya penurunan angka kematian bayi dan kematian maternal, peningkatan umur harapan hidup, penurunan angka morbiditas, dan peningkatan persentase persalinan yang dilakukan oleh tenaga terampil (tenaga kesehatan). Upaya yang dilakukan adalah meningkatkan kegiatan promosi kesehatan, peningkatan kualitas sanitasi lingkungan, peningkatan tindakan preventasi, pengembangan sistem kesehatan yang dapat membantu meringankan beban masyarakat yang sakit, pemberantasan dan pengendalian penyakit menular serta tidak menular, peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan khususnya dokter dan bidan desa, serta peningkatan pelayanan kesehatan terutama Ibu dan anak.

Pembangunan infrastruktur wilayah ditujukan untuk memfasilitasi pembangunan dan pertumbuhan wilayah-wilayah strategis dan pengembangan wilayah tertinggal dan terpencil agar terjangkau oleh berbagai program pemberdayaan masyarakat dan masyarakat memperoleh akses terhadap pelayanan publik yang tersedia. Pada tahap ini dilakukan pengembangan dan peningkatan kualitas sarana dan prasarana transportasi seperti peningkatan panjang dan kemantapan jalan, pembangunan pelabuhan darat dan udara, peningkatan sarana transportasi umum untuk wilayah pedesaan dan perkotaan, pembangunan waduk dan sarana irigasi pendukung lainnya, pembangunan jaringan telekomunikasi, jaringan air bersih dan sanitasi.

Pembangunan ekonomi diarahkan untuk meningkatkan nilai tambah dan pertumbuhan sektor pertanian. Hal ini dilakukan dengan revitalisasi sektor pertanian melakukan pengelolaan secara rasional, optimal, efisien dan bertanggung jawab. Pembangunan sektor pertanian didukung oleh pembangunan infrastruktur pertanian yang memadai sehingga memungkinkan untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi usaha tani. Infrastruktur pertanian seperti sarana irigasi, jalan usaha tani, pasar, dan ketersediaan sarana

transportasi yang memadai untuk mendukung arus komoditas pertanian dari daerah pedesaan ke perkotaan dan antar wilayah.

Pembangunan sumber daya alam di arahkan untuk mewujudkan pengelolaan secara rasional, optimal, efisien dan bertanggung jawab terutama sumber daya alam terbarukan yang masih dalam kondisi baik. Selain itu, dilakukan pemulihan daya dukung terhadap sumber daya alam terbarukan yang sudah dalam kondisi kritis untuk pencadangan bagi kepentingan generasi sekarang dan generasi mendatang. Pada lahan kritis dan lahan pertambangan dilakukan pengkajian dan pengembangan kebutuhan konservasi dan reklamasi. Pengembangan sektor kelautan dan perikanan dilakukan dengan mengkaji potensi sumberdaya kelautan dan pemanfaatannya. Sementara itu, dalam rangka konservasi sumber daya air dilakukan pengkajian potensi dan kebutuhan sumber daya air, dan identifikasi potensi kelembagaan sosial untuk pengelolaan sumber daya air.

Pembangunan dibidang energi selain dilakukan dengan mengembangkan pembangkit energi listrik tenaga fosil juga mulai dijajaki kemungkinan pengembangan energi alternarif terutama energi yang terbarukan. Potensi energi terbarukan cukup besar seperti energi yang bersumber dari mikro hidro, panas bumi, biomass, arus laut, sinar matahari dan tenaga angin. Pada tahap ini mulai dilakukan berbagai studi untuk mengembangkan potensi energi tersebut. Untuk mendukung kegiatan tersebut dilakukan penjajagan kerjasama dengan berbagai pihak baik memiliki teknologi dan juga dana bagi pengembangan energi ramah lingkungan.

2.2. RPJM DAERAH ke-2 (2009 – 2013)

Berlandaskan pelaksanaan, pencapaian, dan sebagai keberlanjutan RPJM Daerah ke-1, RPJM Daerah ke-2 ditujukan untuk melanjutkan dan memantapkan kembali program RPJM Daerah ke-1 di segala bidang dengan menekankan upaya peningkatan pembangunan infrastruktur dan peningkatan kualitas sumber daya manusia termasuk pengembangan kemampuan ilmu dan teknologi serta penguatan daya saing perekonomian. Selain itu, kegiatan pembangunan masyarakat yang beriman, bermoral dan berbudaya dan kesadaran hukum terus dilakukan dengan memantapkan fungsi dan peran agama serta budaya dan kelembagaan masyarakat untuk mendukung tercapainya misi tersebut. Selain bertujuan mewujudkan ketertiban, keamanan, dan ketenteraman, keberhasilan pembangunan di bidang ini ditandai dengan berkembangnya kelompok-kelompok budaya dan kesenian sehingga muncul produk seni dan kreativitas dari masyarakat yang menunjukkan tingginya apresiasi seni budaya masyarakat.

Pembangunan di bidang kesejahteraan rakyat terus dilakukan dengan penekanan pada pemantapan ketahanan dan kemandirian pangan daerah. Untuk meningkatkan fasilitas pembangunan yang perumahan yang memadai, layak dan terjangkau oleh daya beli masyarakat diupayakan dengan memanfaatkan dan mengembangkan potensi pembiayaan perumahan yang berasal dari lembaga keuangan formal dan non-formal. Selain itu, pembangunan di bidang kesejahteraan rakyat dilakukan dengan meningkatkan produktivitas pekerja agar dapat bersaing dan menghasilkan nilai tambah yang tinggi, meningkatkan hubungan industrial yang harmonis dengan perlindungan yang layak, keselamatan kerja yang memadai, serta penyelesaian perselisihan yang memuaskan semua pihak.

Perwujudan kesejahteraan rakyat juga dilakukan dengan meningkatkan jangkauan pelayanan dan rehabilitasi sosial yang berkualitas termasuk pemberdayaan sosial yang tepat guna bagi masyarakat Penyandang Masalah

Kesejahteraan Sosial (PMKS). Selain itu, dilakukan pengembangan dan penataan sistem perlindungan dan jaminan sosial untuk memastikan dan memantapkan pemenuhan hak-hak masyarakat akan pelayanan sosial dasar.

Pembangunan pendidikan masih ditujukan pada penuntasan buta aksara, peningkatan rata-rata lama sekolah melalui penuntasan wajib belajar sembilan tahun. Pada tahap ini untuk wilayah perkotaan wajib belajar sembilan tahun sebagian besar sudah dituntaskan, sementara untuk wilayah pedesaan masih dalam tahap rintisan wajib belajar sembilan tahun untuk seluruh wilayah. Pengembangan pendidikan satu atap untuk penuntasan wajib belajar sembilan tahun terus dilakukan dengan menambah kuantitas sekolah dan melengkapi sarana dan prasarana pendidikan menengah. Penanganan pendidikan usia dini sampai dengan pendidikan tinggi terus dilakukan dengan intensitas yang lebih besar baik dari segi pendanaan maupun dari cakupannya. Perhatian yang makin besar terus diberikan pada pelaksanaan pendidikan di daerah pedesaan, daerah perbatasan antar provinsi dan daerah terpencil. Pengembangan pendidikan menengah terus diupayakan melalui pengembangan sekolah kejuruan berbasis kompetensi dan keunggulan lokal dengan memperhatikan keunggulan komparatif yang dimiliki oleh berbagai wilayah. Pembangunan sekolah kejuruan terus dilakukan agar proporsi jumlah sekolah kejuruan dan sekolah umum semakin dekat.

Pembangunan bidang kesehatan terus dilakukan dalam upaya mencapai target pembangunan yang tercermin dari berbagai indikator kesehatan seperti penurunan angka kematian bayi dan kematian maternal, peningkatan umur harapan hidup, penurunan angka morbiditas, dan peningkatan persentase persalinan yang dilakukan oleh tenaga terampil (tenaga kesehatan). Upaya yang dilakukan pada tahap ini antara lain adalah meningkatkan kesehatan bagi kelangsungan hidup ibu dan anak, peningkatan ketersediaan pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau pada setiap strata pelayanan, peningkatan gizi masyarakat, pengendalian penyakit menular dan tidak menular, pembangunan sistem jaminan kesehatan daerah, peningkatan jumlah, jenis, mutu tenaga kesehatan, dan meningkatkan perilaku dan kemandirian masyarakat. Selain itu, upaya-upaya konvensional dalam meningkatkan derajat kesehatan tetap dilakukan dengan intensitas yang lebih tinggi. Upaya-upaya tersebut antara lain adalah meningkatkan kegiatan promosi kesehatan, peningkatan kualitas sanitasi lingkungan, peningkatan tindakan preventasi, pengembangan sistem kesehatan yang dapat membantu meringankan beban masyarakat yang sakit, peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan khususnya dokter dan bidan desa, serta peningkatan pelayanan kesehatan terutama Ibu dan anak.

Pembangunan infrastruktur wilayah terus dilaksanakan untuk mempercepat pembangunan dan pertumbuhan wilayah-wilayah strategis sehingga dapat mengembangkan wilayah-wilayah tertinggal di sekitarnya dan mempercepat pengembangan wilayah-wilayah tertinggal dan terpencil. Pengembangan dan peningkatan kualitas sarana dan prasarana transportasi terus dilakukan dalam rangka peningkatan panjang dan kemantapan jalan, pembangunan pelabuhan darat dan udara, peningkatan sarana transportasi umum untuk wilayah pedesaan dan perkotaan, pembangunan waduk dan sarana irigasi pendukung lainnya, pembangunan jaringan telekomunikasi, jaringan air bersih dan sanitasi.

Pembangunan ekonomi diarahkan untuk meningkatkan nilai tambah dan pertumbuhan sektor pertanian dengan mengembangkan produk unggulan dan program terobosan. Pertumbuhan ekonomi daerah yang berada dibawah pertumbuhan nasional sehingga perlu dilakukan inovasi dan percepatan

pembangunan ekonomi. Pada tahap ini upaya peningkatan arus investasi terus dilakukan dengan mengembangkan sektor-sektor yang memiliki daya tarik dan daya saing seperti sektor pariwisata, perdagangan, hotel, restoran, dan jasa keuangan. Selain itu, pembangunan sektor pertanian terus dilakukan melalui optimalisasi fasilitasi pembangunan perdesaan melalui pengembangan agropolitan, peningkatan kapasitas SDM, pengembangan jaringan infrastruktur penunjang, peningkatan akses informasi dan pemasaran, pengembangan lembaga keuangan, peningkatan kesempatan kerja, pengembangan teknologi, dan pengembangan *sosial capital* dan *human capital*. Selain itu, peningkatan kinerja perekonomian daerah dilakukan dengan pengembangan usaha kecil menengah dan koperasi melalui penciptaan iklim persaingan usaha yang sehat dan perlindungan konsumen. Dengan demikian, diharapkan terjadi penguatan struktur perekonomian daerah sehingga terwujud ketahanan ekonomi yang tangguh.

Pembangunan sumber daya alam di arahkan untuk peningkatan pemulihan daya dukung terhadap sumber daya alam terbarukan yang sudah dalam kondisi kritis baik di sektor kehutanan, pertanian, perikanan dan perairan. Selain itu, pembangunan sumber daya dilakukan melalui penguatan kapasitas unit atau balai konservasi yang bertanggungjawab pada konservasi sumber daya alam. Selain itu, dilakukan juga sosialisasi terkait dengan pengelolaan SDA yg terbarukan dan terbarukan diikuti dgn penegakan hukum dalam sengketa lahan. Pengembangan pemanfaatan sumber daya kelautan melalui pendekatan multisektor, integratif, dan komprehensif agar dapat meminimalisasi konflik dan tetap menjaga kelestariannya terus dilakukan. Dalam upaya konservasi sumber daya air dilakukan pengembangan keseimbangan antara pasokan dan kebutuhan melalui pendekatan *demand management* yang ditujukan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan dan konsumsi air dan pendekatan *supply management* yang ditujukan untuk meningkatkan kapasitas dan keandalan pasokan air. Pengelolaan sumber daya air juga dilakukan dengan peningkatan kegiatan perlindungan mata air dan air tanah.

Pembangunan dibidang energi terus dilakukan dengan mengembangkan pembangkit energi listrik tenaga fosil. Selain itu, dilakukan penelitian untuk pengembangan energi alternarif terutama energi yang terbarukan. Penelitian tersebut dibarengi dengan membangun beberapa *pilot project* pengembangan listrik yang bersumber dari pembangkit energi terbarukan. Upaya pencarian dukungan dana dari luar terus dilakukan, namun komitmen pemerintah juga harus dibuktikan dengan kesediaan mengalokasikan anggaran untuk kegiatan riset dan pengembangan pembangkit listrik dari energi terbarukan.

2.3. RPJM DAERAH ke-3 (2014 – 2018)

Berlandaskan pelaksanaan, pencapaian, dan sebagai keberlanjutan pembangunan tahap pertama (RPJMD ke-1) dan kedua (RPJMD ke-2), maka RPJM Daerah ke-3 ditujukan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pada peningkatan produksi dan daya saing perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam, sumber daya manusia berkualitas, kemampuan ilmu dan teknologi yang terus meningkat.

Tahap ini ditujukan untuk memantapkan kemajuan daerah dan mengembangkan kesejahteraan masyarakat. Dinamika ekonomi yang mendorong

tumbuh dan berkembangnya sektor perdagangan dan pariwisata pada tahap sebelumnya dan pembangunan infrastruktur ekonomi menjadi peluang untuk semakin memluas jangkauan jaringan kerja kegiatan ekonomi hingga ke manca negara. Pengoperasian Bandara Internasional Lombok menjadi momentum bagi tumbuh dan berkembangnya sektor tersier sehingga diharapkan menjadi mesin pertumbuhan ekonomi daerah. Namun demikian, sektor pertanian tetap menjadi salah satu prioritas pembangunan mengingat kontribusinya dalam menyediakan lapangan kerja terbesar untuk masyarakat. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi pada tahap ini dan peranannya yang makin dominan terutama teknologi informasi dan komunikasi memberikan peluang bagi daerah untuk menjalin kerjasama ekonomi dengan jaringan yang luas. Penguasaan terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi memungkinkan bagi daerah untuk mengoptimalkan pendayagunaan sumber daya yang dimiliki dan meningkatkan daya saing.

Pembangunan ekonomi terus dilakukan guna mencapai pertumbuhan yang optimal dan perubahan struktur ekonomi. Peningkatan pertumbuhan dan nilai tambah sektor pertanian terus diupayakan dengan mengembangkan agroindustri untuk beberapa komoditi unggulan dan meningkatkan akses dan mutu infrastruktur yang ada serta menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi modern sehingga produktivitas dan efisiensi usaha tani dapat ditingkatkan. Sumbangan sektor pertanian dalam pembentukan PDRB terus diupayakan untuk dikurangi dengan mengembangkan sektor jasa dan sektor industri. Kedua sektor tersebut diharapkan dapat menciptakan nilai tambah yang tinggi sehingga membawa dampak pada meluasnya kesempatan kerja dan kesempatan berusaha. Dengan demikian, angka pengangguran dan angka kemiskinan dapat diturunkan.

Pembangunan dibidang pendidikan terus dilakukan dalam upaya mencapai angka melek huruf 100 persen untuk kelompok umur 15-45 tahun. Sealin itu, pada tahap ini rata-rata sekolah telah mencapai sembilan tahun sehingga wajib belajar sembilan tahun tercapai pada periode/tahap ini. Namun demikian, pengembangan pendidikan satu atap untuk penuntasan wajib belajar sembilan tahun terus dilakukan dengan menambah kuantitas sekolah dan melengkapi sarana dan prasarana pendidikan menengah terutama di daerah-daerah pedesaan, daerah terpencil, daerah perbatasan, dan daerah terisolasi. Penanganan pendidikan usia dini sampai dengan pendidikan tinggi terus dilakukan dengan intensitas yang lebih besar baik dari segi pendanaan maupun dari cakupannya sehingga akses dan mutunya meningkat. Pengembangan pendidikan menengah terus diupayakan melalui pengembangan sekolah kejuruan berbasis kompetensi dan keunggulan lokal dengan memperhatikan keunggulan komparatif yang dimiliki oleh berbagai wilayah. Pembangunan sekolah kejuruan terus dilakukan agar proporsi jumlah sekolah kejuruan dan sekolah umum pada periode ini mencapai 40:60.

Pembangunan bidang kesehatan diupayakan untuk memperkuat peningkatan upaya pencegahan melalui peningkatan kegiatan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat dan pemberantasan serta pengendalian penyakit menular serta tidak menular. Selain itu, peningkatan jenis, mutu, jumlah tenaga kesehatan dilakukan seiring dengan upaya peningkatan pelayanan kesehatan terutama ibu dan anak serta pemantapan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pelayanan kesehatan. Untuk mendukung pendanaan pelayanan kesehatan dikembangkan kemitraan dalam pembiayaan kesehatan.

Pembangunan infrastruktur daerah diarahkan pada percepatan pembangunan infrastruktur wilayah dengan lebih meningkatkan kemampuan kelembagaan pengelola serta tetap meningkatkan kerjasama antara pemerintah

dan swasta. Ketersediaan infrastruktur wilayah diupayakan terdistribusi pada seluruh wilayah, dalam mendukung terwujudnya kemandirian masyarakat yang produktif dan memiliki daya saing. Rencana pembangunan perluasan landasan pacu Bandara Internasional Lombok harus dapat dirampungkan pada tahap ini. Begitu juga dengan rencana pembangunan Pelabuhan Nusantara di Lombok Selatan dan Lombok Utara diupayakan dimulai pada tahap ini. Pada tahap ini seluruh jalan baik provinsi dan jalan kabupaten sebagian besar sudah dalam kondisi mantap (baik) sehingga dapat meningkatkan efisiensi di bidang transportasi. Di bidang kelistrikan, pada tahap dilakukan optimalisasi pemenuhan kebutuhan tenaga listrik di daerah dan kehandalannya untuk memulihkan kemampuan pasokan sistem ketenagalistrikan yang memadai. Selain itu, beberapa pembangkit tenaga dengan energi terbarukan sudah mulai dioperasikan dalam jumlah yang signifikan.

Dalam kerangka pencapaian pembangunan yang berkelanjutan, pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup dilaksanakan pemanfaatan sumber daya alam terbarukan secara berkelanjutan dengan mengantisipasi dampak perubahan iklim, dan pemantapan kapasitas personal dan kelembagaan konservasi sumber daya alam daerah. Selain itu, dilakukan penguatan kelembagaan dan peningkatan kesadaran masyarakat yang ditandai dengan berkembangnya proses rehabilitasi dan konservasi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang disertai dengan menguatnya partisipasi aktif masyarakat. Dengan demikian keanekaragaman hayati dan kekayaan sumber daya alam yang ada dapat dipelihara dan kemudian dimanfaatkan untuk mewujudkan nilai tambah, daya saing bangsa, serta modal pembangunan pada masa yang akan datang.

2.4. RPJM DAERAH ke-4 (2019 – 2023)

Berlandaskan pelaksanaan, pencapaian, dan sebagai keberlanjutan RPJM Daerah ke-3, RPJM Daerah ke-4 diarahkan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh di pelbagai bidang dengan menekankan pada terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing. Kemajuan di bidang ekonomi yang ditopang oleh ketahanan pangan dan berkembangnya agroindustri terutama pada beberapa komoditi unggulan sejalan kemajuan di dalam pengelolaan lingkungan hidup sehingga kualitas dan fungsi lingkungan hidup tetap terjaga.

Struktur perekonomian daerah yang makin maju dan kokoh ditandai dengan daya saing perekonomian yang kompetitif dan berkembangnya keterpaduan antara industri, pertanian, kelautan, sumber daya alam, dan sektor jasa. Lembaga dan pranata ekonomi telah tersusun, tertata, serta berfungsi dengan baik. Kondisi tersebut didukung oleh keterkaitan antara pelayanan pendidikan, dan kemampuan Iptek yang makin maju sehingga mendorong perekonomian yang efisien dan produktivitas yang tinggi; serta berkembangnya usaha dan investasi dalam rangka mendukung pertumbuhan perekonomian nasional.

Pembangunan infrastruktur pada tahap ini ditandai dengan ketersediaan infrastruktur yang memadai terutama untuk infrastruktur dasar seperti transportasi, listrik, air bersih, perumahan dan pemukiman, dan sarana telekomunikasi dan informasi. Rasio elektrifikasi sudah di atas 95%, sementara akses rumah tangga terhadap air bersih mencapai 95%, dan semua desa telah mendapatkan aliran energi listrik. Selain itu, pengembangan infrastruktur perdesaan akan terus dikembangkan, terutama untuk mendukung pembangunan pertanian seperti irigasi, dam, sumur bor, dan jalan usaha tani. Ketersediaan

perumahan dan pemukiman yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana pendukung bagi seluruh masyarakat terus meningkat karena didukung oleh sistem pembiayaan perumahan jangka panjang dan berkelanjutan, efisien, dan akuntabel. Dengan demikian, diharapkan dapat semakin mendorong berkurangnya kawasan kumuh di wilayah perkotaan. Selain itu, dengan pemukiman yang layak insiden bencana kebakaran dapat diminimalisasi.

Pada tahap ini, pembangunan dalam bidang kesejahteraan masyarakat telah mampu memberikan perlindungan dan pemenuhan hak asasi masyarakat yang ditandai semakin meningkatnya fasilitasi lembaga jaminan sosial. Selain itu, kualitas sumber daya manusia terus membaik ditandai oleh meningkatnya kualitas dan relevansi pendidikan, termasuk yang berbasis keunggulan lokal dan didukung oleh manajemen pelayanan pendidikan yang efisien dan efektif. Dibidang kesehatan, derajat kesehatan dan status gizi masyarakat telah meningkat sehingga umur harapan hidup meningkat, angka kematian bayi dan kematian maternal menurun, dan tingkat morbiditas juga menurun. Selain itu, kesetaraan gender meningkat yang ditandai oleh meningkat indeks pemberdayaan gender (IDG) dan indeks pembangunan gender (IPG), penanganan anak terlantar semakin sehingga dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, dan kesejahteraan dan perlindungan anak meningkat.

Sejalan dengan itu, pertumbuhan ekonomi yang semakin berkualitas dan berkesinambungan dapat dicapai sehingga pendapatan per kapita pada akhir periode RPJP Daerah mencapai kesejahteraan setara dengan daerah-daerah maju lainnya dengan tingkat pengangguran terbuka dan jumlah penduduk miskin yang makin rendah. Selain itu, konflik antar kelompok masyarakat berhasil diminimalisasi karena peran para tokoh agama, tokoh masyarakat, dan partisipasi masyarakat dalam ikut menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Nilai-nilai agama dan budaya telah tertanam dengan baik dan kelembagaan sosial masyarakat telah berfungsi dengan baik.

2.5. RPJM DAERAH ke-5 (2024 – 2025)

Berlandaskan pelaksanaan, pencapaian, dan sebagai keberlanjutan RPJM Daerah ke-4, RPJM Daerah ke-5 ditujukan untuk mewujudkan masyarakat yang beriman, maju, dan sejahtera melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing. Kondisi beriman, maju dan sejahtera akan terwujud dengan terselenggaranya jaringan transportasi yang handal, tercapainya pemenuhan kebutuhan air bersih dan energi listrik, serta terpenuhinya kebutuhan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana pendukung bagi masyarakat di seluruh wilayah Nusa Tenggara Barat.

Hal ini bisa terwujud karena keberhasilan dalam pembangunan ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan hidup. Pembangunan bidang ekonomi diarahkan untuk mengembangkan komoditas unggulan yang mempunyai kontribusi yang besar terhadap penciptaan kesempatan kerja dan penciptaan nilai tambah. Selain itu, pembangunan ekonomi yang dilakukan telah diikuti oleh pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan. Dalam pembangunan sosial, pembangunan dilakukan dengan berupaya mengoptimalkan mutu dan akses pelayanan sosial dasar seperti pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial, dan berbagai pelayanan dasar lainnya. Pelayanan sosial dasar dilakukan dengan memperhatikan bahwa layanan sosial merupakan hak asasi manusia sehingga setiap orang berhak mendapatkannya. Oleh karena itu, pemberian subsidi pada pelayanan dasar harus diberikan oleh pemerintah sebagai pemegang amanah

melaksanakan pembangunan. Pembangunan budaya dilakukan dengan internalisasi nilai-nilai budaya yang positif mendukung kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dan revitalisasi lembaga budaya masyarakat.

Dalam rangka memantapkan pembangunan yang berkelanjutan, keanekaragaman hayati dan keanekaragaman budaya serta kekhasan sumber daya alam terus dipelihara dan dimanfaatkan untuk terus mempertahankan nilai tambah dan daya saing daerah memasuki pasar global. Keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup. Revitalisasi kelembagaan pengelola sumber daya alam dilakukan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengelola sumber daya alam dan lingkungan. Penghargaan terhadap kearifan lokal menjadi kata kunci dalam melestarikan sumber daya dan lingkungan hidup. Upaya konservasi harus terus dioptimalkan mengingat tantangan berupa pemanasan global dan perubahan iklim memberikan pengaruh yang besar terhadap kelestarian lingkungan hidup dan sumber daya alam.

BAB V PENUTUP

Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Nusa Tenggara Barat Tahun 2005– 2025 yang berisi visi, misi, dan arah pembangunan daerah, merupakan pedoman bagi pemerintah, masyarakat dan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan daerah dalam kurun waktu 2005 – 2025. Selain itu, RPJP Daerah Nusa Tenggara Barat ini menjadi arah dan pedoman di dalam penyusunan RPJP Daerah Kabupaten/Kota di Nusa Tenggara Barat, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Nusa Tenggara Barat lima tahunan dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Nusa Tenggara Barat setiap tahunnya.

Keberhasilan Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat dalam mewujudkan cita-citanya yang terkandung dalam visi Nusa Tenggara Barat yaitu terwujudnya masyarakat Nusa Tenggara Barat yang beriman, maju dan sejahtera, perlu didukung oleh: (1) Komitmen dan kepemimpinan daerah yang baik, bersih dan amanah; (2) konsistensi kebijakan pemerintah daerah; (3) kebijakan yang berpihak kepada masyarakat; dan (4) partisipasi masyarakat dan dunia usaha secara aktif, kreatif dan positif.

Pemerintah Daerah wajib menerapkan 3 pilar dari prinsip Good Governance yang meliputi transparansi, akuntabilitas dan partisipasi dalam melaksanakan program dan kegiatan dalam rangka pencapaian visi, misi dan arah pembangunan sebagaimana tertuang dalam RPJP Daerah Provinsi NTB

Transparansi berarti terbukanya akses bagi semua pihak yang berkepentingan terhadap setiap informasi terkait seperti berbagai peraturan dan perundang-undangan, serta kebijakan pemerintah dengan biaya yang minimal. Informasi sosial, ekonomi dan politik yang andal (reliable). Transparansi dibangun atas pijakan kebebasan arus informasi yang memadai disediakan untuk dipahami dan dapat dipantau.

Akuntabilitas atau *accountability* adalah kapasitas suatu instansi pemerintahan untuk bertanggung gugat atas keberhasilan maupun kegagalannya dalam melaksanakan misinya dalam mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan secara periodik. Setiap instansi pemerintah mempunyai kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pencapaian organisasinya dalam pengelolaan Sumber daya yang dipercayakan kepadanya, mulai dari tahap perencanaan, implementasi, sampai pada pemantauan dan evaluasi.

Akuntabilitas merupakan kunci untuk memastikan bahwa kekuasaan itu dijalankan dengan baik dan sesuai dengan kepentingan publik. Untuk itu, akuntabilitas mensyaratkan kejelasan tentang siapa yang bertanggung gugat, kepada siapa, dan apa yang dipertanggung-gugat. Akuntabilitas bisa berarti pula penetapan sejumlah kriteria dan indikator untuk mengukur kinerja instansi pemerintah, serta mekanisme yang dapat mengontrol dan memastikan tercapainya berbagai standar tersebut.

Akuntabilitas menuntut adanya kepastian hukum yang merupakan resultan dari hukum dan perundang-undangan yang jelas tegas, diketahui publik disatu pihak, serta upaya penegakan hukum yang efektif, konsisten dan tanpa pandang bulu dipihak lain. Kepastian Hukum juga merupakan indikator penting dalam menimbang tingkat kewibawaan suatu pemerintahan, legitimasinya di hadapan rakyatnya dan dunia internasional.

Partisipasi merupakan perwujudan dari berubahnya paradigma mengenai peran masyarakat dalam pembangunan. Masyarakat bukanlah sekedar penerima manfaat (beneficiaries) atau obyek belaka, melainkan agen pembangunan (subyek yang mempunyai porsi yang penting. Pelaksanaan semua kegiatan, baik dalam kerangka regulasi maupun dalam kerangka anggaran (budget invention), mensyaratkan pentingnya keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan, baik diantara kegiatan dalam suatu program maupun kegiatan antar program, dalam satu dinas dan antar dinas, dengan tetap memperhatikan peran/tanggung-jawab/tugas yang melekat pada pemerintah kota, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

RPJP Provinsi NTB Tahun 2005-2025 merupakan acuan bagi Pemerintah Daerah maupun masyarakat termasuk dunia usaha sehingga tercapai sinergi dalam pelaksanaan program pembangunan. Untuk itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaannya sebagai berikut :

1. Pemerintah daerah, serta masyarakat termasuk dunia usaha berkewajiban untuk melaksanakan visi, misi dan arah pembangunan RPJP Daerah Provinsi NTB Tahun 2005-2025 dengan sebaik-baiknya.
2. Gubernur berkewajiban untuk menjabarkan visi, misi dan arah pembangunan RPJP Daerah Provinsi NTB Tahun 2005-2025 kedalam RPJM Provinsi NTB yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pokok pembangunan yang nantinya akan menjadi pedoman bagi Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) dan menyusun Rencana Strategis (Renstra) SKPD.
3. Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) Provinsi NTB berkewajiban menyusun Rencana Strategis (Renstra) SKPD yang menjabarkan visi, misi dan program Kepala Daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi NTB, Bupati NTB, Sekretariat Daerah, dinas-dinas, badan-badan, kantor-kantor dan Kecamatan dalam jajaran organisasi pemerintah Provinsi NTB, masyarakat dan sektor swasta berkewajiban menjamin konsistensi antara Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi NTB Tahun 2005-2025 dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi NTB, Rencana strategis (Renstra) SKPD Provinsi NTB, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Daerah Provinsi NTB dan Rencana Kerja (Renja) SKPD Provinsi NTB.

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

ttd.

H. M. ZAINUL MAJDI